

SKRIPSI

**PENGARUH PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DESA KATOMPORANG KABUPATEN PINRANG**



OLEH

**HIKMAH PURNAMA
NIM: 2120203862202013**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

**PENGARUH PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DESA KATOMPORANG KABUPATEN PINRANG**



OLEH

**HIKMAH PURNAMA
NIM: 2120203862202013**

Skripsi sebagai salah satu untuk memperoleh gelar Sarjana
Akuntansi (S. Akun) pada Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pengaruh Pengelolaan Dana Desa Terhadap
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa
Katomporang Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Hikmah Purnama

Nomor Induk Mahasiswa : 2120203862202013

Program Studi : Akuntansi Syari'ah

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Nomor: B-4136/In.39/FEBI.04/PP.00.9/08/2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Ira Sahara, M.Ak (.....)

NIP : 199012202019032016

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag
NIP. 1967102082001122002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi
terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) Di MTs DDI Ujung
Kec. Lanrisang

Nama Mahasiswa : Emma

NIM : 2120203862202019

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Nomor: B-2955/In.39/FEBI.04/PP.00.9/06/2024

Tanggal Kelulusan : 12 Juni 2025

Disahkan Oleh Komisi Penguji

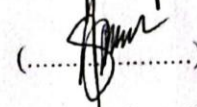
Rini Purnamasari, S.E., M.Ak.

(Ketua)



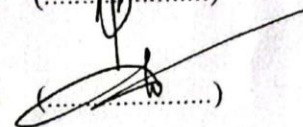
Ira Sahara, S.E., M.Ak.

(Anggota)



Indrayani, S.E., M.Ak.

(Anggota)



Mengetahui:

DEKORERIAN AGAM
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Prof. Dr. Muzdaffar Muhammadun, M.Ag.
NIP. 197102081001122002



“Pengaruh Pengelolaan Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Desa Katomporang Kabupaten Pinrang” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana akuntansi pada program studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Negeri Parepare.

Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW suri tauladan seluruh umat manusia, yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman penuh cahaya ilmu dan iman.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Hartati dan Ayahanda Abduh Muh. Islam tercinta dimana dengan pembinaan dan berkat dan doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Ira Sahara, M. Ak selaku pembimbing, atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Ibu Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M. Ag., sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Rini Purnamasari, M. Ak., selaku Ketua Prodi Akuntansi Syariah dan Bapak Nur Hishaly gh, M. M. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktunya secara konsisten memberikan nasihat, bimbingan, motivasi dan arahan.
4. Bapak Dr. Abdul Hamid, S.E., M.M. dan Darwis, S.E., M. Si selaku dosen penguji skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini serta untuk menguji skripsi penulis
5. Bapak dan ibu dosen program studi Akuntansi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.

6. Bapak/Ibu tenaga administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang senantiasa memberikan pelayanan yang sangat baik.
7. Abdul Azis dan Astri Novitasari selaku saudara penulis yang telah membantu dalam menyelesaikan studi.
8. Teman – teman saya Ayu Andira, Wahyu Anna, Aulia Hamru, Arma, dan Putri Tirani Jusman yang senantiasa membantu dan menemani penulis selama masa perkuliahan dan menamai penulis selama proses penyusunan skripsi.
9. Serta teman-teman yang tidak bisa penulis tulis satu persatu.
10. Teman- teman Program Studi Akuntansi Syariah angkatan 2021.

Penulis tak lupa untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dan telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. Berkenan menilai segala Kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan Rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 12 Juni 2025 M

17 Dzulhijah 1446 H

Penulis,



Hikmah Purnama

Nim: 212020386220213

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hikmah Purnama
Nim : 2120203862202013
Tempat/Tgl. Lahir : Lasape, 16 April 2003
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Pengaruh Pengelolaan Dana Desa terhadap
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa
Katomporang Kabupaten Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 12 Juni 2025 M
17 Dzulhijah 1446 H



Hikmah Purnama

Nim: 212020386220213

ABSTRAK

Hikmah Purnama. *Pengaruh Pengelolaan Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Katomporang Kabupaten Pinrang* (dibimbing oleh Ira Sahara)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengelolaan dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Katomporang Kabupaten Pinrang. Penelitian ini dilatarbelakangi untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat dengan adanya pengelolaan dana desa.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survey. Sampel pada penelitian ini adalah masyarakat yang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) berjumlah 30 responden. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penyebaran kuesioner dan dianalisis menggunakan regresi linear sederhana dengan bantuan SPSS.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan dana desa t hitung $9,635 >$ nilai t tabel $(2,043)$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ artinya pengelolaan dana desa berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa Katomporang Kabupaten pinrang, Dengan demikian, pengelolaan dana desa menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan keuangan yang baik dapat mendukung peningkatan kesejahteraan.

Kata Kunci: Pengelolaan Dana Desa, Kesejahteraan Masyarakat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PEGUJI	iv
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	8
B. Tinjauan Teori	11
C. Kerangka Pikir	30
D. Hipotesis.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	33
C. Populasi dan Sampel	33

D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	35
E. Definisi Operasional Variabel	36
F. Instrumen Penelitian.....	38
G. Teknik Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Deskripsi Hasil Penelitian	44
B. Pengujian Prasyarat Analisis Data	50
C. Pengujian Hipotesis	57
D. Pembahasan Hasil Penelitian.....	59
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	69

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 1.1	Dana Desa 4 Tahun Terakhir	4
Tabel 3.1	Definisi Operasional Variabel	37
Tabel 3.2	Instrumen Penelitian	38
Tabel 4.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kalamini	44
Tabel 4.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	44
Tabel 4.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan	46
Tabel 4.4	Distribusi Jawaban Responden Pengelolaan Dana Desa	47
Tabel 4.5	Distribusi Jawaban Responden Kesejahteraan Masyarakat	49
Tabel 4.6	Hasil Statistik Deskriptif	51
Tabel 4.7	Validitas Variabel Independen (X)	51
Tabel 4.8	Validitas Variabel Dependen (Y)	52
Tabel 4.9	Uji Reliabilitas Variabel (X)	53
Tabel 4.10	Uji Reliabilitas Variabel (Y)	54
Tabel 4.11	Uji Normalitas <i>Shapiro-Wilk</i>	54
Tabel 4.12	Uji Regresi Linear Sederhana	56
Tabel 4.13	Uji Parsial (Uji T)	57
Tabel 4.14	Uji Koefisien Determinasi (Uji R ²)	58

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Pikir	30
Gambar 4.1	Uji Heteroskedastisitas	55

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Instrumen Penelitian	70
2	Deskripsi Jawaban Responden (X)	73
3	Deskripsi Jawaban Responden (Y)	74
4	Hasil SPSS	75
5	Surat Penetapan Pembimbing	83
6	Surat Izin Meneliti Dari Dinas Penanaman Modal	84
7	Surat Selesai Meneliti Dari Kantor Desa Katomporong	85
8	Dokumentasi Penulis	86
9	Biodata Penulis	87

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda. Daftar huruf Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	tha	Th	te dan ha
ج	jim	J	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	dhal	Dh	de dan ha
ر	ra	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye

ص	shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wau	W	we
هـ	ha	H	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	Y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal Tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	a
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

2. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
أَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : ḥaula

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasi berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ / ٲ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas

وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas
----	----------------	---	---------------------

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

1. *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
2. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau ada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*. Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madīnah al-fāḍilah atau almadīnatul fāḍilah

الْحِكْمَةُ : al-hikmah

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـَـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan sebuah perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā

نَجَّيْنَا : najjainā

الْحَقُّ : al-haqq

الْحَجَّ : al-hajj

نُعِم : nu'ima

عَدُوُّ : 'aduwwun

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf maddah (i). Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asyamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalزالah (bukan azzalزالah)

الفَلْسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-bilādu

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : ta'murūna

النَّوْءُ : al-nau'

شَيْءٌ : syai'un

أَمِرْتُ : umirtu

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar*Qur'an*), *Sunnah*, khusus dan

umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ṣilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *Dīnullah*

بِاللَّهِ : *Billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālāh*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum fī rahmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi

Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: *Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd* (bukan: *Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū*)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = subḥānahū wa ta‘āla s

aw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

a.s. = ‘alaihi al- sallām

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun

w. = Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص = صفحة

دم = بدونمكان

صلعم = صلى الله عليه وسلم

ط = طبعة

دن = بدون ناش

الخ = إلى آخرها/ آخره

ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj.: Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No.: Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terselenggaranya otonomi daerah di Indonesia diharapkan dapat lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, dan keadilan efektifitas sumber daya keuangan pada semua elemen pemerintah. Desentralisasi melahirkan otonomi daerah yang bertujuan untuk memaksimalkan pelayanan dan lebih mendekatkan fungsi pemerintah kepada masyarakat.¹ dengan itu desa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional karena sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di wilayah pedesaan. Dengan memprioritaskan pembangunan desa, kesejahteraan masyarakat desa dapat meningkat. Namun, selama ini desa masih tertinggal dalam hal infrastruktur seperti jalan, listrik, air bersih, fasilitas kesehatan, dan pendidikan dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Terbatasnya peluang kerja di desa juga mendorong masyarakat untuk merantau ke kota dan bekerja di sektor informal atau sebagai buruh musiman.

Selain itu, desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dan sangat membutuhkan pelayanan dari aparat pemerintah. Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah disebutkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kepala desa sebagai wakil pemerintah di tingkat paling bawah memiliki

¹ Ira Sahara, "Analisis Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Pelaksanaan Program Kerja Di Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare," *Economos: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 3 (2020): 118–28.

tanggung jawab agar masyarakatnya sejahtera dengan berbagai program pembangunan di desa.²

Dana Desa merupakan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer langsung ke rekening desa, yang penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan desa. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60/2014, yang menyatakan bahwa prioritas pemanfaatan dana desa adalah untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan.³

Dalam implementasinya, pengelolaan dana desa menjadi faktor kunci yang menentukan keberhasilan tujuan tersebut. Pengelolaan yang efektif, transparan, dan akuntabel dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki infrastruktur, serta membuka peluang ekonomi baru di tingkat desa. Sebaliknya, pengelolaan yang kurang optimal berpotensi menimbulkan penyimpangan, ketidakmerataan manfaat, dan pada akhirnya tidak memberikan dampak signifikan terhadap kualitas hidup masyarakat desa.

Keterlibatan masyarakat merupakan salah satu unsur yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan program pembangunan maupun pengembangan masyarakat desa. Keterlibatan masyarakat dibutuhkan untuk menciptakan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Keterlibatan masyarakat tidak hanya mencakup pengambilan keputusan dalam setiap program pembangunan desa.

Begitu pula dalam hal partisipasi masyarakat terhadap pemanfaatan dan pengelolaan dana desa, keterlibatan ini sangat penting agar penggunaannya menjadi lebih tepat sasaran dan manfaatnya benar-benar sesuai dengan

² Didik Aribowo et al., *BUMDes Dan Kesejahteraan Masyarakat Desa*, Dr. Cucu N (Jakarta Pusat: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2018). h. 2

³ Anik Yuesti, *Akuntansi Dana Desa* (Sidoarjo: Zifatama Jawa, 2023). h. 4

kebutuhan nyata masyarakat⁴. Dalam penyusunan anggaran desa, khususnya pengelolaan dana, diperlukan perencanaan program kegiatan yang melibatkan masyarakat desa secara langsung.

Dana desa ditujukan untuk pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, alokasi dana desa yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara memiliki dua fokus utama, yaitu pembangunan dan pemberdayaan. Artinya, tidak hanya pembangunan fisik yang penting, tetapi juga upaya memberdayakan masyarakat agar desa menjadi mandiri dan terbebas dari kemiskinan⁵.

Faktanya masih banyak masyarakat pedesaan yang belum mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya oleh karena itu pemerintah meluncurkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa guna membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan bagian timur Indonesia yang memiliki realisasi anggaran dana desa yang mencapai Rp. 2,06 Triliun. Pada tahun 2025 Sulawesi selatan merupakan salah satu dari 38 Provinsi di Indonesia saat ini. Dimana Sulawesi Selatan memiliki 2.255 desa, 792 kelurahan, 301 kecamatan yang terdapat di 21 kabupaten dan 3 kota, dimana salah satunya Kabupaten Pinrang Kecamatan Duampanua. Kecamatan Duampanua termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Pinrang. Kecamatan Duampanua memiliki 10 desa dimana diantaranya Desa Katompurang.

Desa Katompurang di Kabupaten Pinrang ialah salah satu desa yang mendapatkan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa ini masih menjadi pertanyaan. Oleh sebab itu, penting untuk mengkaji sejauh mana pengelolaan dana desa yang dilakukan telah mampu mendorong

⁴ Satria Mentari Tumbel, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di DesaTumaluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan," *Jurnal Politico* 6, no. 1 (2017): 1–21. h. 1

⁵ Yamulia Hulu et al., "Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa" 10, no. 1 (2018): 146–54. h. 149

peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik, dari aspek ekonomi, sosial, maupun pelayanan dasar.

Berikut ini adalah tabel dana desa di Desa Katomporang selama 4 tahun terakhir yakni:

Tabel 1.1 Dana Desa 4 tahun terakhir

Tahun	Dana Desa	Dana BLT	Persentase
2021	892.698.000	216.000.000	24%
2022	778.754.000	216.000.000	28%
2023	824.974.000	108.000.000	13%
2024	832.502.000	108.000.000	13%

Sumber: Kantor Desa Katomporang

Desa Katomporang yang berada di Kecamatan Duampanua telah melakukan melaksanakan program bantuan langsung tunai (BLT) yang telah dilaksanakan selama 5 tahun program tersebut telah dilaksanakan pada awal tahun 2020 guna membantu masyarakat dengan keterbatasan ekonomi, program ini menjadi salah satu upaya nyata pemerintah dalam meredam dampak pandemi dan memperkuat ketahanan ekonomi.

Salah satu bentuk pelatihan yang dilakukan kejaksaan negeri Pinrang mengadakan pelatihan Aplikasi Jaga Desa guna mewujudkan pengelolaan dana desa yang transparan, akuntabel dan efektif dimana kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan dana desa yang dikelola dengan baik, pembangunan desa dapat berjalan optimal tentunya juga untuk kepentingan masyarakat, aplikasi ini hadir sebagai pendamping dan mengawasi yang siap membantu perangkat desa mencegah potensi penyalahgunaan wewenang serta penggunaan anggaran desa.⁶ Pelatihan aplikasi Jaga Desa oleh Kejari Pinrang dapat menjadi intervensi penting dalam meningkatkan kualitas

⁶ Alman, "Kejari Pinrang Mengadakan Pelatihan Aplikasi Jaga Desa Guna Mewujudkan Pengelolaan Dana Desa Yang Transparan, Akuntabel Dan Efektif," 26 Februari, 2025.

pengelolaan dana desa di Desa Katomporong. Penelitian tersebut dapat menilai peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan dana desa yang lebih transparan dan akuntabel.

Beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Novelia Kiki Permatasari, Enjat Sudrajat, Asih Sunarsih, membahas tentang pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil peneliti menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, dan terdapat hubungan positif dan signifikan antara pengelolaan dana desa dengan indeks pembangunan manusia, selain itu indeks pembangunan manusia juga menunjukkan hasil positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.⁷

Adapun pembaruan yang dilakukan oleh peneliti yaitu peneliti ingin melihat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Katomporong dengan adanya pengelolaan dana desa apakah program-program yang dilakukan Desa Katomporong sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Adapun fokus peneliti ingin melihat apakah program bantuan langsung tunai sebagai salah satu program yang didanai oleh dana desa dapat peningkatan kesejahteraan masyarakat karena dengan adanya bantuan langsung tunai dapat membantu masyarakat kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah ada, peneliti ingin melengkapi dengan data-data yang terkait dan melakukan penelitian dengan objek yang berbeda. Dari hasil observasi yang dilakukan di Desa Katomporong peneliti menemukan bahwa salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam kesejahteraan masyarakat di desa Katomporong adalah bagaimana pengelolaan dana desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan program bantuan langsung tunai yang diberikan dapat meningkatkan kesejahteraan.

⁷ Asih Sunarsih Novelia Kiki Permatasari, Enjat Sudrajat, "Pengaruh Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Yang Dimediasi Oleh Indeks Pembangunan Manusia Dan Dimoderasi Oleh Akuntabilitas," *Tirtayasa Ekonoika* 19, no. 2 (2024): 275–88.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengelolaan dan desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Katomporang. Dengan pendekatan kuantitatif, penelitian ini akan mengukur hubungan dan pengaruh antara kualitas pengelolaan dana desa mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan/ pertanggungjawaban.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

Apakah pengelolaan dana desa berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Katomporang Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui pengelolaan dana desa berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Katomporang Kabupaten Pinrang

D. Manfaat Penelitian

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk peneliti sendiri maupun orang lain, manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memperluas dan memperdalam wawasan serta meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan dana desa.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan mampu memperluas dan memperdalam peneliti mengenai pengelolaan dana desa

- b. Bagi mahasiswa, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai sumber referensi dalam memahami pengetahuan mahasiswa tentang bagaimana pengelolaan dana desa
- c. Bagi Pemerintah Desa, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk seberapa baik pengelolaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Dalam penelitian ini mengkaji informasi yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang telah ada sebelumnya sebagai bahan yang akan dilakukan. Berdasarkan telah yang sudah dilakukan, peneliti memperoleh beberapa informasi dari sumber yang relevan dan layak dijadikan acuan dalam penelitian yang akan dilakukan:

1. Penelitian oleh Rinaldi (2020) dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Pemberdayaan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Islam” penelitian ini menggunakan metode mixed methods, yaitu metode yang menggabungkan antara metode kuantitatif dan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat pada Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Desa Namploh dilakukan dengan dua prosedur yaitu prosedur jual beli dan simpan pinjam. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat pada Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Namploh Papeun Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen.⁸ Adapun persamaan dari penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada variabel dependen yaitu kesejahteraan masyarakat. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus dan variabel independen dan lokasi penelitian.
2. Penelitian oleh Nismawati (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengelolaan Dana Desa Ditengah Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Desa Bulu Allaporenge Kecamatan Bengo Kabupaten Bone)” penelitian ini

⁸ Rinaldi, “Pengaruh Pemberdayaan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Islam” (UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2020).

menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa dalam pengelolaan dana desa di tengah pandemi Covid-19 memiliki perbedaan dengan pengelolaan dana desa yang ada pada tahun sebelumnya, pengelolaan dana desa ditengah pandemi ini ada perencanaan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya karena anggaran dana yang telah disiapkan untuk infrastruktur harus di alihkan untuk bantuan kepada masyarakat.⁹ Adapun persamaan dari penelitian diatas dengan penelitian yaitu variabel independen sedangkan perbedaannya terletak pada variabel dependen dan lokasi penelitian.

3. Penelitian oleh Syarifa Amira (2022) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Masyarakat Desa cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru sesuai dengan peraturan Meteri Dalam Negari No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa ada beberapa tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausaha, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pembangunan di Dana Desa Cilellang juga sudah bisa dikatakan meningkatkan karena telah memenuhi indikator Pembangunan di Desa Cilellang juga sudah bisa dikatakan meningkatkan karena telah memenuhi indikator Pembangunan yang berhasil diantaranya infrastruktur desa yang baik, fasilitas umum yang memadai, kemudahan dalam akses informasi, kualitas sumber daya manusia unggul dan tingkat pendapatan penduduk.¹⁰ Adapun persamaan

⁹ Nismawati, “Pengelolaan Dana Desa Ditengah Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Desa Bulu Allaporeng Kecamatan Bengo Kabupaten Bone)” (Universitas Hsanunddin, 2021).

¹⁰ Syarifa Amira, “Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Masyarakat Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru” (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022).

dari penelitian diatas yaitu pada variabel independen sedangkan perbedaanya terletak pada lokasi dan variabel dependen.

4. Penelitian oleh M. Fikri Assiddiq pada tahun 2022 “Pengaruh Kelembagaan Desa, Trasnsparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Jati Kusuma Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang” Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kelembagan desa, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh positif dan singnifikan secara parsial dan simultan terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Jati Kusuma Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang. Adapun persamaan dari penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada subjeknya yaitu pengelolaan dana desa. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus, objek dan tempat penelitiannya dimana pada penelitian dilakukan di Desa Jati Kusuma Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Katomporang Kabupten Pinrang.
5. Penelitian oleh Susi fikasari pada tahun 2024 dalam penelitiannya yang berjudul “Pengelolaan Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Tuncung Kabupaten Enrekang” Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah penggunaan sumber daya organisasi, tahapan proses pengelolaan (perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, pengendallian dan pengawasan), seni menyelesaikan pekerjaan. Faktor yang mempengaruhi pengalokasian pertimbangan anggaran ialah kinerja dari pemerintah desa, hal-hal yang perlu di perhatikan dalam menunjang kinerja ialah (kualitas perencanaan anggaran, tingkat partisipasi masyarakat, karakteristik kepemimpinan). Dalam

prespektif manajemen keuangan syariah pemerintah Tuncung telah menerapkan Akuntabilitas dengan membuat laporan tahunan atau LPJ sedangkan transparansi dilihat dari adanya papan transparan anggaran dana desa. Dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Tuncung dari segi bidang pembangunan infrastruktur, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat.¹¹ Adapaun persamaan dari penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada subjeknya yaitu pengelolaan dana desa. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus, objek dan tempat penelitiannya dimana pada penelitian diatas objeknya adalah Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Tuncung Kabupaten Enrekang. Adapun perbedaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan dimana penelitian ini menggunakan metode kuantitatif.

B. Tinjauan Teori

1. *Grand Theory: Stewardship Theory*

Teori *stewardship* adalah teori yang menggambarkan situasi para manajer yang tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan Individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi.¹² Teori ini berlandaskan pada konsep psikologi dan sosiologi yang dirancang oleh para eksekutif dalam suatu perusahaan atau organisasi, di mana individu sebagai pelayan termotivasi untuk bertindak secara optimal sesuai harapan pemerintah pusat dan masyarakat. Teori *stewardship* mengasumsikan bahwa terdapat keterkaitan yang erat antara kepuasan dan keberhasilan organisasi, yang mencerminkan pencapaian maksimal atas tujuan organisasi. Teori ini

¹¹ Susi Fikasari, “Pengelolaan Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Tuncung Kabupaten Enrekang” (IAIN Pare pare, 2024).

¹² Lex Donaldson and James H. Davis, “Stewardship Theory or Agency Theory:,” *Australian Journal of Management* 16, no. June 1991 (1991): 49–66.

lebih relevan diterapkan di lembaga pemerintahan yang fokus utamanya bukan pada keuntungan, melainkan pada pelayanan publik yang optimal.

Dalam konteks penelitian ini, teori *stewardship* dapat menjelaskan peran pemerintah desa sebagai *steward*, yaitu lembaga yang dipercaya dan bertindak demi kepentingan masyarakat melalui pelaksanaan tugas dan fungsi secara tepat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa bertanggung jawab dalam menyusun laporan keuangan yang akuntabel dan transparan, sesuai dengan karakteristik laporan keuangan seperti relevansi, keandalan, keterpahaman, dan keterbandingan. Untuk mencapai akuntabilitas tersebut, diperlukan kompetensi yang memadai dari aparat pengelola dana desa. Akuntabilitas yang diwujudkan oleh pemerintah desa ini juga memunculkan *responsiveness* atau tanggapan dari masyarakat, yang dapat menjadi masukan berharga untuk mendorong pembangunan dan pengambilan keputusan di masa mendatang.

Laporan keuangan yang akuntabel dan transparan dapat tercapai melalui pengendalian yang efektif, sehingga menghasilkan informasi keuangan berkualitas sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Teori ini juga menekankan pentingnya komitmen organisasi di dalam perusahaan yang lebih mengutamakan tujuan perusahaan daripada kepentingan individu demi pencapaian sasaran bersama. Aparatur yang memiliki tingkat komitmen organisasi tinggi akan melaksanakan semua aktivitasnya dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sedangkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dana desa akan memudahkan aparat dalam mengolah dan mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilakukan kepada masyarakat, sehingga aparat akan dengan

mudah menjalankan kewajibannya sebagai pelayan untuk memberikan pelayanan kepada publik.¹³

2. Teori Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik adalah suatu proses mengumpulkan, mencatat, mengklasifikasi, meringkas, serta membuat laporan transaksi keuangan untuk organisasi publik. Sektor publik sendiri memiliki makna sebagai seluruh organisasi yang tidak dijalankan secara publik. Sektor publik sendiri memiliki makna sebagai seluruh organisasi yang tidak dijalankan secara pribadi. Namun didirikan dibiayai yang dioperasikan oleh pemerintah atas nama publik.¹⁴ Beberapa ahli berbeda dalam mendefinisikan akuntansi sektor publik. Di antara pengertian akuntansi sektor publik yaitu: akuntansi sektor publik sebagai proses pengukuran identifikasi pencatatan serta pelaporan seluruh transaksi keuangan dari pemerintah daerah dengan tujuan untuk mengambil keputusan ekonomi. Sedangkan lainnya menyatakan bahwa akuntansi sektor publik adalah akuntansi yang berguna untuk mencatat kegiatan ekonomi suatu organisasi nirlaba atau nonprofit.

Tujuan dari akuntansi sektor publik adalah untuk mencapai hasil yang bermanfaat. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang kegiatannya berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa publik guna memenuhi kebutuhan serta hak masyarakat. Dalam beberapa aspek, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi di sektor swasta.

Akuntansi sektor publik sangat terkait dengan penerapan dan pengelolaan akuntansi di ranah publik. Ranah publik memiliki cakupan yang lebih luas dan kompleks dibandingkan sektor swasta. Hal ini tidak hanya

¹³ Ellsa Diah Pramita, “Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Islam” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).h 21

¹⁴ Indrayani, *Modul Akuntansi Sektor Publik* (IAIN Parepare, 2022).

disebabkan oleh beragam jenis dan bentuk organisasi di dalamnya, tetapi juga karena kompleksitas lingkungan yang memengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut. Secara kelembagaan domain publik meliputi lembaga-lembaga pemerintahan (pemerintah pusat dan daerah serta unit kerja pemerintah)¹⁵

Implikasi teori akuntansi sektor publik berperan penting dalam menganalisis pengelolaan dana desa, karena teori ini menekankan prinsip-prinsip dasar seperti akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan partisipasi publik dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk di tingkat desa. Dalam konteks pengelolaan dana desa, akuntabilitas diwujudkan melalui kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan setiap penggunaan dana kepada masyarakat dan pihak yang berwenang, biasanya melalui laporan pertanggungjawaban dan forum musyawarah desa. Transparansi tercermin dari keterbukaan informasi terkait alokasi dan realisasi dana desa, misalnya dengan memasang baliho anggaran atau mempublikasikan laporan keuangan desa melalui media digital. Selain itu, teori akuntansi sektor publik juga menyoroti pentingnya efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran publik, yang dalam pengelolaan dana desa berarti memastikan dana digunakan tepat sasaran dan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat desa. Tidak kalah penting adalah partisipasi masyarakat, di mana warga desa dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan program dana desa, sehingga pengelolaan keuangan menjadi lebih demokratis dan sesuai dengan kebutuhan lokal.

3. Dana Desa

Dana desa dan aloksi dana desa memiliki perbedaan. Dana desa merupakan pendapatan desa yang bersumber dari APBN. Penyaluran dana desa secara langsung ke desa melalui rekening kas desa (RKD) melalui

¹⁵ Bastian Indra, *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Kedu (Jakarta: Selembah Empat, 2006). Hal. 13.

rekening kas umum desa (RKUD) sebagai penyimpan sementara dana desa. Sedangkan aloksi dana desa merupakan pendapatan desa yang bersumber dari APBD yang merupakan kewajiban pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan APBD melalui dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kemudian disalurkan ke rekening kas desa.

Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota.¹⁶ Dana Desa yang bersumber dari APBN adalah wujud rekognisi Negara kepala desa. Bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau kota untuk desa ini paling sedikit 10% dari distribusi proporsional untuk setiap desa.

Dana Desa bertujuan untuk mempercepat Pembangunan desa, meningkatkan pelayanan publik di desa, serta mengurangi kesenjangan Pembangunan antar wilayah. dana desa juga merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat dalam mendorong kemandirian desa dan memperkuat ekonomi lokal berbasis potensi yang dimiliki oleh masing-masing desa dan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari Pembangunan.

Dalam pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan adalah Kepala Desa. Kepala Desa bertugas untuk menetapkan PTKPD (Pelaksana Teknik Pengelola Keuangan Desa), menetapkan petugas pemungutan penerimaan

¹⁶ Reublik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa” (n.d.).pasal 1 ayat 11

desa, menyetujui pengeluaran yang ditetapkan dalam APB desa, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB desa.¹⁷

Sesuai yang diamanatkan dalam undang-undang No.6 tahun 2014 tentang Desa, bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa serta penaggulangan kemiskinan melalui:

1. Penyediaan Kebutuhan Dasar
2. Pengembangan Sarana dan Prasarana,
3. Pengembangan potensi ekonomi lokal, dan
4. Pemanfaatan SDA-Lingkungan secara Berkelanjutan.

4. Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan adalah pengawasan terhadap suatu hal yang dalam proses pelaksanaan hingga pencapaian tujuan. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai usaha dalam melakukan sesuatu agar lebih sesuai dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. Pengelolaan sebagai fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan/pertanggungjawaban untuk mencapai efisiensi pekerjaan.

Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.¹⁸

Mengatur dana desa adalah serangkaian aktivitas yang terdiri dari perencanaan, implementasi dan evaluasi serta tanggung jawab atas aktifitas yang telah dilakukan maka dalam mengatur dana desa harus berdasarkan

¹⁷ Sri Wahyuni and Darmawan Sriyanto, *Pengelolaan Dana Desa Demi Kesejahteraan Masyarakat Penulis*., ed. Bincar Nasution (PT Inovasi Pratama Internasional, 2023).h.43

¹⁸ Rian Nugroho, *Kebijakan Publik Formulasi Kebijakan Publik* (Indonesia: Elex Media Komputindo, 2003).

prinsip terbuka, tanggung jawab dan partisipasi serta dikerjakan secara teratus dan patuh untuk mendorong tercapainya *good governance* dalam pelaksanaan pemerintahan di masyarakat desa.¹⁹

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa merupakan regulasi yang mengatur secara menyeluruh mengenai tata kelola dan desa mulai dari penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penggunaan, hingga pelaporan dan evaluasi. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan dana desa digunakan secara efektif, transparan, dan akuntabel guna mendukung pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta kegiatan kemasyarakatan di desa. Alokasi dana dilakukan berdasarkan formula yang mempertimbangkan keadilan dan kinerja, seperti alokasi dasar, afirmasi, kinerja, dan formula khusus.

Dana desa disalurkan dalam dua tahap dengan syarat administrasi yang harus dipenuhi melalui sistem daring. PMK ini juga menetapkan mekanisme pengawasan dan evaluasi oleh pemerintah pusat dan daerah, serta memungkinkan pemberian insentif bagi desa berprestasi maupun sanksi administrasi bagi yang tidak memenuhi ketentuan. PMK ini mulai berlaku pada 1 Januari 2024.

Pengelolaan dana desa adalah dengan melibatkan dana harus memberikan manfaat bagi masyarakat desa. Manfaat tersebut dapat berupa peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan, serta peningkatan pelayanan publik.²⁰

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 113 tahun 2014 menyebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

¹⁹ Garda Fajar Panuluh, “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun” (Universitas Muhamadiyah Ponorogo, 2020). h. 14.

²⁰ Fajar Panuluh, *Buku Pintar Dana Desa, Proposal SIMLITAMAS*, 2020.

dan pertanggungjawaban keuangan desa.²¹ Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam masa 1 tahun anggaran, terhitung sejak tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Peraturan tersebut memiliki 5 tahap dalam melakukan pengelolaan keuangan desa yang baik yang seharusnya memang dijalankan sebagai ketentuan umum, diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Perencanaan

Perencanaan adalah jalan untuk memenuhi ekspektasi berbagai pihak (*stakeholders*) yang terkait dengan kegiatan. Perusahaan perencanaan dibutuhkan di setiap tingkatan manajemen. Tanpa perencanaan, semua kegiatan organisasi bisnis akan menjadi tidak berarti. Mengingat ukuran organisasi yang akan semakin besar dan kompleks ada dua alasan kenapa perusahaan perlu melakukan perencanaan. Pertama, *protective benefit* atau manfaat perlindungan. Perencanaan akan memberikan perlindungan terhadap organisasi atau perusahaan bersangkutan yang dihasilkan dari pengurangan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan. Kedua, *positive benefit* atau manfaat kebaikan. Artinya dengan perencanaan yang ada, suatu organisasi atau perusahaan akan mendapatkan manfaat kebaikan dalam bentuk meningkatnya keberhasilan dalam pencapaian tujuan.²²

Perencanaan keuangan desa adalah proses pemikiran dan penentuan secara matang untuk mencapai suatu tujuan dalam pengelolaan keuangan desa dalam hal kegiatan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat. Perencanaan keuangan desa dilaksanakan oleh sekretaris desa dengan menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan RKPDes tahun berkenaan dan menyampaikan kepada

²¹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa,” n.d.pasal .1

²² Darwis, *Fundamental Manajemen: Fungsi-Fungsi Dalam Implementasi*, ed. Damirah (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022).hal. 62

Kepala Desa. Selanjutnya, rancangan tersebut disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan.

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan pembangunan desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 tahun sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 tahun. RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang pelaksanaannya paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan.

2) Pelaksanaan

Pelaksanaan keuangan desa adalah proses dimana peraturan desa tentang APBDes yang telah ditetapkan sebelumnya dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa dalam pelayanan, pembangunan maupun dalam pemberdayaan. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. semua pemasukan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Dalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Dalam pelaksanaannya, bendahara desa dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Batasan jumlah uang tunai yang disimpan dalam kas desa ditetapkan

dengan peraturan bupati/walikota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa didukung oleh bukti yang lengkap dan sah serta ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.²³

3) Penatausahaan

Penatausahaan adalah proses dimana semua kegiatan/pelaksanaan keuangan desa dikelola dan dicatat dalam buku-buku tertentu oleh bendahara desa yang sebelumnya telah ditetapkan oleh kepala desa dengan keputusan kepala desa. Setiap pencatatan dan pengeluaran, tutup buku setiap akhir bulan secara tertib serta wajib bendahara mempertanggungjawabkan merupakan tugas yang harus dilakukan oleh bendahara. Bendahara desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi.

Penatausahaan baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas, Bendahara Desa menggunakan :

- a) Buku Kas Umum
- b) Buku Kas Pembantu Pajak
- c) Buku Bank

Bendahara Desa melakukan pencatatan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum untuk yang bersifat Tunai. Sedangkan transaksi penerimaan dan pengeluaran yang melalui bank/transfer dicatat dalam Buku Bank. Buku Kas Pembantu Pajak digunakan oleh Bendahara Desa untuk mencatat penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak dan mencatat pengeluaran berupa penyetoran pajak ke kas negara. Khusus untuk pendapatan pembiayaan, terdapat buku pembantu berupa buku rincian pendapatan dan buku rincian pembiayaan.²⁴

²³ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, 2015. h.63

²⁴ Pembangunan. h.90

4) Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDes/ laporan realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Sedangkan laporan semester akhir disampaikan paling lambat pada akhir bulan anuari tahun berikutnya.²⁵

Rincian laporan sebagai berikut:

Laporan kepada bupati/walikota (melalui camat)

1. Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan APBDes.
2. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
3. Laporan realisasi penggunaan dana desa

Laporan kepada badan permusyawaratan desa (BPD):

1. Laporan keterangan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Pengelolaan dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa, yang dimana dalam pengelolaannya dilakukan dalam kerangka pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas, yaitu:

- a. Transparansi, keterbukaan yang dimana memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang pengelolaan keuangan desa.
- b. Akuntabel, perwujudan kewajiban untuk melakukan pelaporan atau mempertanggungjawabkan semua yang telah dilakukan dalam

²⁵ Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.”

mengelola dan mengendalikan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercepat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

- c. Partisipasi, yaitu penyelenggaraan pemerintah desa untuk mengikutsertakan kelembangaan desa dan masyarakat desa yang seharusnya dilibatkan.
- d. Tertip dan disiplin anggaran, pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang telah ditetapkan atau pedoman yang telah melandasinya.

Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan. Akuntabilitas merupakan bentuk tanggungjawab pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Akuntabilitas pemerintah dianggap sangat diperlukan sebagai penunjang penerapan otonomi desa agar berjalan dengan baik.²⁶ Adanya otonomi daerah memberikan tanggungjawab kepada daerah dalam mewujudkan pemerintah yang transparan dan akuntabel, meningkatkan pelayanan masyarakat menjadi lebih baik, dan tentunya untuk mengembangkan kehidupan masyarakat lebih demokratis. Dengan otonomi daerah setiap bagian dalam tata kelola daerah termasuk dalam hal keuangan sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah sehingga dibutuhkan transparansi dan pertanggung jawaban atau akuntabilitas terhadap pengelolaan tersebut.²⁷

²⁶ Sri Wahyuni Nur, "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tellumpanuae Kabupaten Maros," *Um Jember Press*, n.d., 725–39.

²⁷ DKK Frihatni, Andi ayu, "Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Parepare," *Economos: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 4 (2021): 229–39.

5. Kesejahteraan Masyarakat

a. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat terdiri dari dua kata yaitu kesejahteraan dan masyarakat. Kesejahteraan berasal dari kata dasar sejahtera. Sejahtera artinya aman, sentosa, dan makmur, selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesyukuran, dan sebagainya). Kesejahteraan adalah hal dalam keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, dan ketentraman (kesenangan hidup dan sebagainya), kemakmuran.²⁸

Kesejahteraan ialah suatu ruang kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang meliputi rasa keselamatan diri, kesesuaian dan ketentraman yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan juga kebutuhan sosial yang baik bagi diri sendiri, keluarga serta masyarakat pada umumnya. Kaitan antara konsep kesejahteraan dan konsep kebutuhan adalah dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hidup tersebut, maka seseorang dapat dinilai sejahtera, karena tingkat kebutuhan tersebut secara tidak langsung sejalan dengan kesejahteraan.

Kesejahteraan ini merupakan titik tolak ukur bagi masyarakat yang berarti bahwa pada kondisi manusia dimana orang-orang dalam keadaan kehidupan makmur, dalam keadaan damai, sehat jasmani rohani, sehingga untuk mencapai kondisi itu orang tersebut memerlukan suatu usaha sesuai kemampuan yang dimilikinya.

Ciri-ciri pokok masyarakat adalah manusia yang hidup bersama. Mereka bercampur untuk waktu yang cukup lama. Mereka merupakan suatu sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan, oleh karena itu setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu sama lainnya.

²⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).
h. 1284

Kesejahteraan sebagai tujuan utama pembangunan dapat diraih apabila aspek kedaulatan ekonomi dan tata kelola karena itu, membangun kedaulatan ekonomi dan tata kelola perekonomian yang baik dapat diwujudkan secara nyata karena itu membangun kedaulatan ekonomi dan tata kelola perekonomian yang baik, merupakan persyaratan utama bagi tercapainya kondisi kesejahteraan dan bangsa.

Peningkatan kesejahteraan adalah keadaan sosial yang memungkinkan bagi setiap masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup yang bersifat jasmani, rohani, dan sosial sesuai dengan hakekat dan martabat manusia untuk dapat mengatasi berbagai masalah sosial yang dihadapi diri, keluarga dan masyarakat untuk berkembang menjadi lebih baik.

Peningkatan ekonomi merupakan suatu hal yang sepenuhnya harus dilakukan guna memberikan kesejahteraan masyarakat. Dalam peningkatan ekonomi untuk berkembang menjadi lebih baik.

b. Tujuan Kesejahteraan Masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat mempunyai tujuan yaitu:

- 1) Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
- 2) Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, masalah dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

Selain itu tiga tujuan utama dari sistem kesejahteraan masyarakat yang sampai tingkat tertentu tercermin dalam semua program kesejahteraan masyarakat yaitu pemeliharaan sistem, pengawasan sistem

dan perubahan sistem.²⁹ Pemeliharaan sistem merupakan upaya untuk menjaga agar program-program kesejahteraan yang sudah ada tetap berjalan secara konsisten, efektif, serta dukungan kelembagaan agar manfaat program tetap dirasakan oleh masyarakat. Selanjutnya, pengawasan sistem bertujuan memastikan bahwa pelaksanaan program kesejahteraan berjalan sesuai aturan, transparan, dan tepat sasaran. Melalui pengawasan, pemerintah maupun masyarakat dapat mencegah terjadinya penyimpangan, seperti korupsi, penyelewengan bantuan, atau pelayanan yang tidak adil. Terakhir, perubahan sistem pengacuh pada penyesuaian atau pembaruan kebijakan dan mekanisme pelaksanaan program agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat yang berkembang perubahan ini penting untuk meningkatkan efektifitas program dan menjawab tantangan sosial, ekonomi, dan budaya yang berubah dari waktu ke waktu.

c. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan seseorang pada realitanya memiliki banyak indikator yang dapat diukur. Pengukuran tingkat kesejahteraan seseorang juga sering mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Di antara aspek yang sering digunakan sebagai indikator ukuran kesejahteraan adalah pendapatan, populasi, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, konsumsi, perumahan, dan sosial budaya.³⁰

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan beberapa indikator-indikator kesejahteraan yang merupakan suatu ukuran ketercapaian masyarakat dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Indikator kesejahteraan masyarakat menurut Biro Pusat

²⁹ Lisnawati, “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada Dusun Padakkalawa Kab. Pinrang” (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024). h. 15

³⁰ Dahliana Sukmasari, “Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur’an,” *Jurnal OF Qur’an and Hadis Studies* 3, no. 1 (2020): 1–16. h. 3

Statistik Indonesia menerangkan bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran, antara lain:

1) Tingkat pendapatan keluarga

Tingkat pendapatan keluarga adalah jumlah keseluruhan pendapatan yang diterima oleh semua anggota rumah tangga baik dari pekerjaan formal, sewa, honor maupun sumber lain dalam periode tertentu, yang kemudian diklasifikasikan ke dalam kategori seperti rendah, menengah, atau tinggi. Ukuran ini digunakan sebagai indikator penting dalam menilai kesejahteraan ekonomi keluarga, karena berbanding lurus dengan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.

2) Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non-pangan

Komposisi pengeluaran rumah tangga merupakan Gambaran bagaimana pendapatan rumah tangga dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan hidup, secara umum terbagi menjadi dua kategori utama: pengeluaran untuk pangan dan pengeluaran untuk non-pangan. Pengeluaran pangan mencakup semua biaya untuk konsumsi makanan dan minuman, baik yang dimasak sendiri maupun yang dalam bentuk jadi. Sementara itu pengeluaran non-pangan meliputi kebutuhan lain seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, komunikasi serta rekreasi.³¹

3) Tingkat pendidikan keluarga

Tingkat pendidikan keluarga adalah merujuk pada jenjang pendidikan tertinggi yang telah ditempuh oleh anggota rumah tangga, khususnya yang menjadi kepala keluarga. Ukuran ini biasanya

³¹ “Pengeluaran Untuk Konsumsi Penduduk Indonesia,” Badan Pusat Statistik Indonesia, 2023.

mengacu pada latar belakang pendidikan formal. Tingkat pendidikan ini sering dijadikan indikator penting karena memiliki pengaruh signifikan terhadap aspek kehidupan keluarga, seperti kondisi ekonomi, akses terhadap pekerjaan layak, serta kualitas kesehatan dan lingkungan tempat tinggal.

4) Tingkat kesehatan keluarga

Tingkat kesehatan keluarga mencerminkan sejauh mana sebuah keluarga dapat memenuhi kebutuhan dasar anggota-anggotanya tidak hanya fisik, tetapi juga kesehatan mental dan sosial salah satu indikator penting seperti penggunaan air bersih, jamban, sehat, kepemilikan jaminan kesehatan, imunisasi lengkap serta lain sebagainya.

5) Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga.³²

Kondisi perumahan dan fasilitas dalam rumah tangga mencerminkan seberapa layak hunian tersebut bagi penghuninya, baik dari fisik bangunan maupun akses terhadap layanan dasar, secara keseluruhan, evaluasi kondisi perumahan ini mencakup aspek fisik bangunan (ketahanan, luas, bahan), fasilitas air bersih, serta sanitasi yang kesemuanya berperan penting dalam menentukan kelayakan dan kesehatan lingkungan rumah tangga.

Perhatikan firman Allah swt. Dalam Q.S Al-Baqarah/1: 172 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ١٧٢

³² Badan Statistik Indonesia, *Statistik Indonesia 2000* (jakarta, 2000).

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik yang Kami anugerahkan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepada-Nya.”³³

Tafsirnya

Wahai orang-orang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang sehat, aman dan tidak berlebihan, dari yang kami berikan kepada kamu melalui usaha yang kamu lakukan dengan cara yang halal. Dan bersyukurlah dengan cara yang halal. Dan bersyukurlah kepada Allah dengan mengakui bahwa semua rezeki berasal dari Allah dan kamu harus memanfaatkannya sesuai ketentuan Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu beberapa hal. Pertama, bangkai, yaitu binatang yang mati tidak dengan disembelih secara sah menurut ketentuan agama; kedua, darah yang aslinya mengalir, bukan limpa dan hatinya memang beku; ketiga, daging babi dan bagian tubuh babi lainnya seperti tulang, lemak, dan lainnya serta produk turunannya; dan keempat, daging hewan yang disembeli dengan menyebut nama selain Allah, yaitu hewan persembahan untuk patung dan roh halus yang dianggap oleh orang musyrik dapat memberikan perlindungan dan keselamatan. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya karena kalau tidak memakannya diduga menyebabkan kematian akibat kelaparan, bukan karena mengiginkannya tetapi memang tidak ada makan lain, dan tidak ada pula melampaui batas karena yang dimakan hanya sekedar untuk bertahan hidup, maka tidak ada dosa baginya memakan makanan yang haramkan itu. Sungguh, Allah maha pengampun terhadap dosa yang dilakukan oleh hambanya, apalagi dosa yang tidak disengaja. Allah

³³ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, n.d.

maha penyayang kepada seluruh hambanya, sehingga dalam keadaan darurat dia membolehkan memakan makanan yang diharamkan agar hambanya tidak mati kelaparan.

d. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

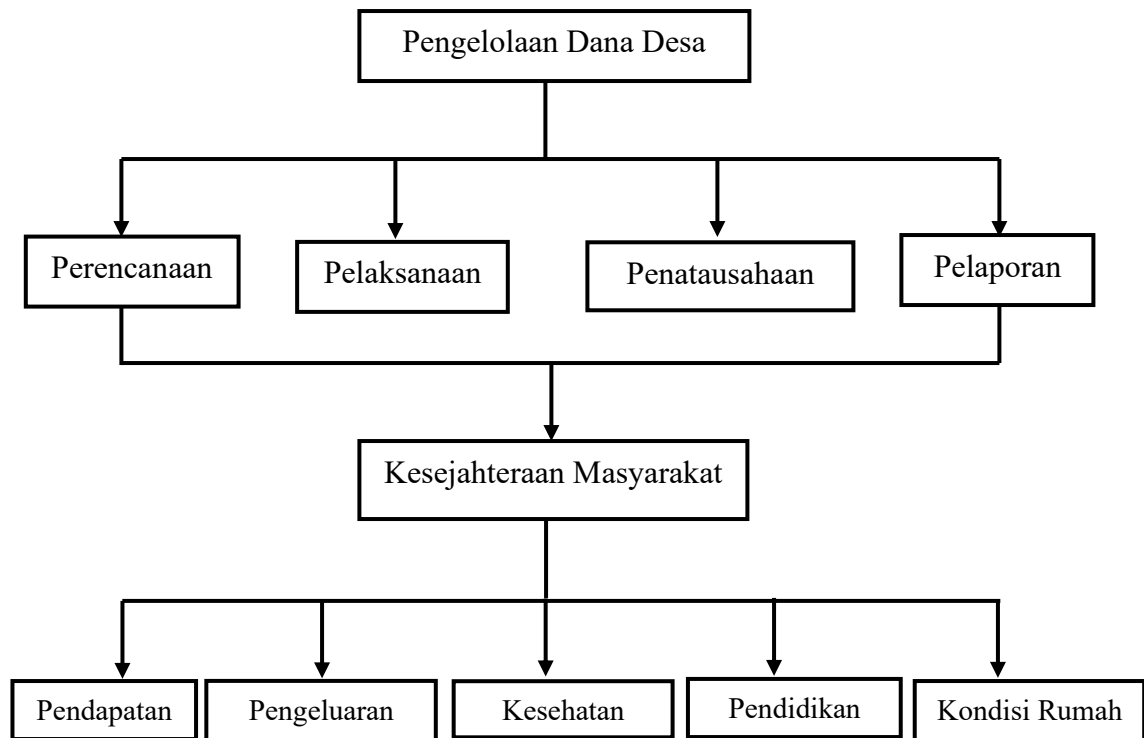
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-D) merupakan bantuan keuangan yang bersumber dari dana desa dan ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari akibat adanya pandemi *covid-19*. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Desa PDTT No.6 Tahun 2020 tentang Perubahan Menteri Desa PDTT No.11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Diantaranya Terkait penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT-D).³⁴

Dalam rangka melaksanakan pelaksanaan BLT-D ini berbagi kebijakan lain diterbitkan diantaranya adalah Intruksi Menteri Dalam Negeri No.3 tahun 2020 tentang penanggulangan *covid-19* di Desa melalui Anggran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Menteri keuangan No. 205 tahun 2019 tentang Penggunaan Dana Desa.

³⁴ “Buku Saku Pendataan BLT Dana Desa,” Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), 2020.

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan masalah dan tujuan yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti menyajikan kerangka pikir yang telah dirumuskan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

D. Hipotesis

Tujuan penelitian adalah menelaah hubungan sistematis antara variabel-variabel. Hubungan ini biasanya disajikan dalam bentuk hipotesis yang merupakan suatu unsur penelitian yang amat penting. Hipotesis adalah kesimpulan sementara atau proposisi tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Berdasarkan kerangka pikir diatas, maka perumusan hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis dalam penelitian ini disusun berdasarkan dua teori utama, yaitu Stewardship Theory dan Teori akuntansi sektor publik. Stewardship theory menekankan bahwa aparat pemerintah desa sebagai “pelayan” bertindak demi

kepentingan masyarakat luas, demi keuntungan pribadi. Dalam konteks ini, pengelolaan dana desa yang efektif mencerminkan peran aktif dan tanggung jawab pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, teori akuntansi sektor publik menyoroti pentingnya akuntabilitas, transparansi, efisiensi, serta partisipasi dalam pengelolaan dana publik dalam hal ini dana desa sebagai bagian dari system tata kelola keuangan yang baik.

Penelitian ini didukung oleh beberapa studi sebelumnya yang menunjukkan adanya pengaruh positif antara pengelolaan dana desa dengan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini oleh Novelia Kiki Permatasari (2024) menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat yang dimediasi oleh akuntabilitas. Demikian pula, penelitian susi fikasari (2024) pada desa Tuncung menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa yang memperhatikan perencanaan, transparansi, dan akuntabilitas, secara nyata berdampak terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, baik melalui pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan ekonomi. Sebaliknya, ada pula penelitian yang menunjukkan hasil berbeda atau kurang sejalan. Seperti hasil penelitian Nismawati (2021) di desa Bulu Allaporenge menemukan bahwa pengelolaan dana desa pada masa pandemi Covid-19 tidak sepenuhnya berjalan efektif karena perencanaan yang semula diarahkan untuk pembangunan fisik harus dialihkan untuk bantuan sosial, sehingga pencapaian kesejahteraan dalam bentuk jangka panjang tidak maksimal. Selain itu, penelitian oleh Syarifa Amira (2022) menyoroti bahwa meskipun prosedur pengelolaan dana desa di desa Cilellang sudah sesuai aturan, belum semua indikator kesejahteraan masyarakat tercapai secara merata. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dana desa dikelola sesuai prosedur, keberhasilan peningkatan kesejahteraan juga bergantung pada konteks lokal, partisipasi masyarakat, dan efektifitas. Berdasarkan pemikiran dan penelitian tersebut, dalam penelitian ini diperoleh hipotesis:

H₀: pengelolaan dana desa tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Katomporang Kabupaten Pinrang

H_a: pengelolaan dana desa berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Katomporang Kabupaten Pinrang

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan *positivistic* (data konkrit), data penelitian berupa angka-angka yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji penghitungnya, berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan, berkaitan dengan masalah data yang diperoleh di lapangan, peneliti menggunakan *software* SPSS. Penelitian kuantitatif dipilih karena bertujuan untuk menguji hubungan Pengelolaan Dana Desa (variabel independent) terhadap Kesejahteraan Masyarakat (variabel dependen) secara objektif dan sistematis.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi

Berdasarkan judul maka lokasi penelitian ini berfokus di Desa Katomporang Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian adalah lama penelitian tersebut dikerjakan. Adapun waktu penelitian yang dibutuhkan yaitu adalah 1 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi (sebuah kelompok) yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti, dipelajari dan kemudian

diambil kesimpulannya,³⁵ Populasi adalah keseluruhan dari kumpulan elemen yang memiliki sejumlah karakteristik umum, yang mencakup bidang-bidang untuk diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Katomporang Kecamatan Duampanua.

Desa Katomporang terletak di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang yang memiliki luas 1240 hektar dan terdiri atas 2 dusun diantaranya dusun Lasape dan dusun Malang kemudian desa Katomporang memiliki 2.966 penduduk.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang terpilih menjadi sasaran penelitian. Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki jumlah dan karakteristik. Penelitian membutuhkan ketelitian ketika memilih anggota populasi menjadi anggota sampel, karena sampel yang baik adalah sampel yang benar-benar mewakili seluruh karakteristik yang ada pada populasi (representatif).³⁶

Teknik sampling ialah teknik pengambilan sampel, untuk menentukan sampel yang akan digunakan. Untuk pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *non-probability* sampling dengan pendekatan *purposive sampling* (pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan).

Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dilakukan oleh peneliti sendiri yang didasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.³⁷ Sampel yang diambil dari populasi haruslah benar-bener valid dan representatif sehingga dapat mengukur sesuatu dengan baik. Sampel dalam penelitian ini

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: ALFABETA,CV, 2013). h. 80

³⁶ Dkk Amruddin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, ed. Fatma Sukmawati (Sukoharjo: Pradina Pustaka, 2022). h.96

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. h.85

adalah masyarakat Desa Katomporang yang menerima bantuan langsung tunai (BLT) sebanyak 30 orang.

D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu proses pengumpulan data primer dan data sekunder. Dalam suatu penelitian, pengumpulan data adalah langkah yang sangat penting karena data yang dikumpulkan akan digunakan untuk pemecahan masalah yang sedang diteliti. Berdasarkan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Adapun teknik pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan terhadap fakta-fakta yang dibutuhkan oleh penelitian. Observasi adalah dasar ilmu pengetahuan, karena para ilmuwan bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang dihasilkan melalui kegiatan observasi.³⁸

b. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden.³⁹

c. Dokumentasi

Teknik dokumenter atau disebut juga dokumentasi merupakan teknik-teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah

³⁸ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta, 2021). h. 90

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. h. 142

dokumentasi (informasi yang didokumentasikan) berupa dokumentasi tertulis maupun dokumentasi terekam.⁴⁰

2. Teknik Pengelolaan Data

Teknik pengolahan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan aplikasi SPSS. SPSS merupakan program software yang bertujuan untuk menganalisis data dan melakukan perhitungan statistik baik parametrik maupun non parametrik. SPSS memiliki kemampuan analisis statistik cukup tinggi, karena selain memberi kemudahan dalam perhitungan juga mampu menganalisis penelitian dengan variabel yang lebih banyak.⁴¹

E. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi atau petunjuk kepada kita tentang bagaimana caranya mengukur suatu variabel, sedangkan variabel penelitian adalah suatu sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.

Dalam penelitian ini ada dua variabel yang digunakan yaitu variabel independen atau variabel bebas yaitu Pengelolaan Dana Desa (X), dan satu variabel dependen atau variabel terikat yaitu Kesejahteraan Masyarakat (Y) dari masing-masing variabel tersebut dapat diukur dengan faktor-faktor yang mempengaruhi dituangkan ke dalam kuesioner sehingga lebih terarah dan sesuai dengan metode yang digunakan.

⁴⁰ Syarida Hanafi Sahir, *Metodologi Penelitian*, Try koryat (Medan: Kbm Indonesia, 2022).

⁴¹ Fenty Fauziah and Rinda Sandaya Karhab, "Pelatihan Pengolahan Data Menggunakan Aplikasi SPSS Pada Mahasiswa" 1, no. 2 (2019): 129–36. h.132

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator
1	Pengelolaan Dana Desa	Pengelolaan dana desa adalah pengelolaan atas dana pemerintah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau perolehan lain yang sah untuk tujuan.	1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Penatausahaan 4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban ⁴²
2	Kesejahteraan Masyarakat	Kesejahteraan masyarakat merupakan komponen penting dalam pembangunan ekonomi. Program Bantuan Langsung Tunai atau BLT merupakan program bantuan pemerintah berupa pemberian uang tunai, yang diberikan kepada masyarakat miskin untuk membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup.	1. Tingkat Pendapatan Keluarga 2. Komposisi Pengeluaran 3. Tingkat Pendidikan Keluarga 4. Tingkat Kesehatan Keluarga 5. Kondisi Perumahan ⁴³

⁴² Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.”

⁴³Indonesia, *Statistik Indonesia 2000*.

F. Instrumen Penelitian

Adapun penilaian instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu skala liker. *Skala likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.⁴⁴ Jawaban dari setiap instrumen yang menggunakan *skala likert* mempunyai gradasi dari pernyataan yang sangat setuju sampai sangat tidak setuju, untuk keperluan analisis kuantitatif maka jawaban tersebut diberikan skor sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Instrumen Penelitian

Pernyataan	Keterangan	Skor
Sangat Setuju	SS	5
Setuju	S	4
Netral	N	3
Tidak Setuju	TS	2
Sangat Tidak Setuju	STS	1

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan pengolahan setelah data dari seluruh responden yang terkumpul dalam penelitian kuantitatif. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan dari responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dan seluruh responden, menyajikan data setiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Perhitungan tersebut akan dilakukan dengan menggunakan SPSS.

1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. h. 93

kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Pengujian statistik dalam penelitian ini antara lain: *mean* (rata-rata), standar deviasi dan minimum dan maksimum.

2. Uji Kualitas Data

Uji kualitas data adalah serangkaian prosedur yang digunakan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan atau digunakan dalam penelitian, analisis, atau sistem informasi memiliki keakuratan, konsistensi, dan keandalan yang cukup untuk tujuan yang dimaksudkan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data tersebut dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya dan dapat digunakan pengambilan keputusan yang tepat.

a. Uji Validitas

Validitas merupakan metode atau serangkaian prosedur yang digunakan untuk mengukur suatu konsep tertentu dan memastikan apakah suatu item pertanyaan dianggap valid. Oleh sebab itu data yang diperoleh melalui instrumen penelitian (dalam penelitian ini kuesioner) akan mengukur apa yang ingin diukur. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah butir-butir dalam sebuah pertanyaan (konstruk) layer digunakan untuk mendefinisikan suatu variabel. Instrumen yang valid berarti alat ukur tersebut mampu mengumpulkan data yang akurat. Uji validitas diukur dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk $df=n-2$ dengan α 0,05. Adapun dasar pengambilan keputusan dari uji validitas yaitu:

- a. Jika r hitung $>$ r tabel, maka kuesioner tersebut dinyatakan valid.
- b. Jika r hitung $<$ r tabel, maka kuesioner tersebut dinyatakan tidak valid.

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas merupakan alat ukur yang digunakan untuk menentukan sejauh mana data yang diperoleh melalui instrumen penelitian memiliki tingkat keandalan yang dapat dipercaya. Uji ini dilakukan untuk mengetahui konsistensi hasil pengukuran jika dilakukan pengukuran ulang terhadap gejala dan alat ukur yang sama. Reliabilitas menunjukkan tingkat keandalan tertentu. Reliabel berarti dapat dipercaya dan diandalkan. Dimana reliabilitas instrumen dianggap andal jika memiliki koefisien reliabilitas $> 0,6$. Adapun ketentuan untuk menetapkan tingkat reliabilitas didasarkan ketentuan berikut ini:

- a. Jika nilai *Cronbach alpha* $> 0,6$, maka kuesioner tersebut dinyatakan reliabel.
- b. Jika nilai *Cronbach alpha* $< 0,6$, maka kuesioner tersebut dinyatakan tidak reliabel.

3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah tahap yang penting pada analisis regresi linear sederhana. Kegunaan dari uji asumsi klasik adalah untuk melengkapi uji statistik yang sudah dilaksanakan yakni uji t dan uji f. pengujian ini dilakukan untuk memeriksa kualitas data agar diketahui validitas datanya dan untuk menghindari terjadinya estimasi yang bias. Dalam penelitian ini uji asumsi klasik yakni, uji normalitas, dan uji heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas sebagai salah satu uji statistik parametrik, maka analisis regresi berganda dapat dilakukan jika sampel yang dipakai berdistribusi normal.⁴⁵ Data yang terdistribusi secara normal akan lebih baik digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan fenomena

⁴⁵ Mutmainah Mintarti Indartini, *Analisis Data Kuantitatif*, ed. Hartirini Warnaningtyas (Jawa Tengah: Lakeisha, 2024). h. 9

yang terjadi. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan melihat nilai signifikan pada Kolmogrov-Smirnov atau Shapiro-Wilk, di mana nilai signifikan $> 0,05$ menunjukkan data terdistribusi normal. Dasar pengambilan keputusan dari uji normalitas yaitu;

- 1) Jika Kolmogrov-Smirnov atau Shapiro-Wilk > 0.05 , maka data terdistribusi secara normal.
- 2) Jika Kolmogrov-Smirnov atau Shapiro-Wilk < 0.05 , maka data tidak terdistribusi secara normal.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain.⁴⁶ Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka disebut homokedastisitas. jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Deteksi dilakukan dengan melihat adanya pola tertentu dalam grafik yang terjadi antara sumbu Y yang telah diprediksi dan sumbu X yang telah *distudentized*.

4. Analisa Regresi Linear Sederhana

Analisa regresi linear sederhana pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen.⁴⁷ Teknik regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh signifikan satu variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).

$$Y = a + Bx$$

Y: Variabel dependen (variabel terikat)

X: Variabel independen (variabel bebas)

a: Konstranta

b: Koefisien regresi

⁴⁶ Resista Vikaliana and Dkk, *Ragam Penelitian Dengan Spss*, ed. Miftahus Sahu (Jawa Tengah: CV Tahta Media Group, 2022). h.24

⁴⁷ Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian* (Bandung: CV Alfabeta, 2023). h. 261

5. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan dua tes. yang pertama adalah uji-t yang digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas (independen) secara parsial terhadap variabel terikat (dependen). Dan uji koefisien determinasi (R^2) untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh hubungan antara variabel bebas (independen) dengan variabel terikat (dependen). Model pengujiannya ialah:

a. Uji Parsial (Uji T)

Uji t merupakan bentuk pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji parsial ini dilakukan untuk membuktikan sejauh mana variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan dalam uji parsial adalah sebagai berikut:

- 1) Jika signifikansi (probabilitas) $< 0,05$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka hipotesis yang diajukan menyatakan pengaruh antara variabel independent terhadap variabel dependen.
- 2) Jika signifikansi (probabilitas) $> 0,05$ atau $t_{hitung} < t_{tabel}$, Maka hipotesis yang diajukan menyatakan tidak adanya pengaruh antara variabel independent terhadap variabel dependen.

b. Uji Koefisien Determinasi

R-square (R^2) disebut juga sebagai koefisien determinasi yang menjelaskan seberapa jauh data variabel terikat (dependen) dapat dijelaskan oleh data variabel bebas (independen) mampu menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel terikat (dependen).

Uji Koefisien Determinasi R-square (R^2) menunjukkan seberapa besar pengaruh hubungan antara variabel bebas (independent)

dengan variabel terikat (dependen). Koefisien determinasi R^2 pada dasarnya mengukur seberapa baik model dalam menjelaskan variasi terikat (dependen). Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 sampai 1. Jika nilai R^2 mendekati 1 menunjukkan bahwa hasil model regresi baik atau variabel bebas (independen) secara umum dapat menjelaskan variabel terikat (dependen). Sedangkan jika nilai R^2 mendekati 0, berarti variabel independen secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Analisis Deskriptif Responden Berdasarkan Karakteristik

Penelitian ini mengambil 30 responden dan profil responden yang diinput terdiri dari jenis kelamin, usia, dan pekerjaan. Adapun hasilnya sebagai berikut.

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Frequenecy		Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Laki-Laki	11	36,7	36,7	36,7
Perempuan	19	63,3	63,3	100,0
Total	30	100,0	100,0	

Sumber Data: Diolah Peneliti Tahun 2025

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa 30 orang penerima Bantuan Langsung Tunai menjadi sampel dalam penelitian ini. Responden dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 11 responden dengan persentase sebesar 36,7% dan untuk responden dengan jenis kelamin perempuan berjumlah 19 responden dengan persentase sebesar 63,3%. Maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden pada penelitian ini berjenis kelamin perempuan.

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Frequency		Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
15-30	3	10,0	10,0	10,0
35-45	6	20,0	20,0	30,0
45-55	7	23,3	23,3	53,3

>55	14	46,7	46,7	100,0
Total	30	100,0	100,0	

Sumber Data: Diolah Peneliti Tahun 2025

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa 30 orang responden masih berusia 15-30 tahun berjumlah 3 responden dengan persentase 10,0 %, responden berusia 35-45 tahun berjumlah 6 responden dengan persentase 20%, responden 45-55 tahun berjumlah 7 responden dengan persentase 23,3%, dan responden berusia 55> berjumlah 14 responden dengan persentase 46,7%. Maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden berusia >55.

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Frequency		Percent	Valid Percent	Cumulatif Percent
Petani	8	26,7	26,7	26,7
Ibu Rumah Tangga	19	63,3	63,3	90,0
Tidak Bekerja	3	10,0	10,0	100,0
Total	30	100,0	100,0	

Sumber Data: Diolah Peneliti Tahun 2025

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa 30 orang responden bekerja sebagai petani sebanyak 8 responden dengan persentase 26,7%, responden yang bekerja sebagai ibu rumah tangga sebanyak 19 responden dengan persentase 63,3%, dan yang tidak bekerja sebanyak 3 responden dengan persentase 10,0%. Maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden bekerja sebagai ibu rumah tangga.

2. Hasil Data Instrumen Penelitian

Data instrument penelitian ini berasal dari pernyataan yang dibuat dalam bentuk kuesioner untuk instrumen yang pertama itu merupakan kelompok pernyataan yang berkaitan dengan Pengelolaan Dana Desa.

Tabel 4.4 Distribusi Jawaban Responden Pengelolaan Dana Desa

Variabel	SS		S		N		TS		STS		Total (N)	Total (%)
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%		
Item 1	5	16,7	13	43,3	4	13,3	8	26,7	0	0	30	100
Item 2	1	3,3%	7	23,3	8	26,7	12	40,0	2	6,7	30	100
Item 3	3	10,0	5	16,7	11	36,7	11	36,7	0	0	30	100
Item 4	4	13,3	2	6,7	8	26,7	14	46,7	2	6,7	30	100
Item 5	1	3,3	6	20,0	6	20,0	15	50,0	2	6,7	30	100
Item 6	2	6,7	2	6,7	9	30,0	16	53,3	1	3,3	30	100

Sumber Data: Diolah Peneliti Tahun 2025

Berdasarkan tabel 4.4 sebaran jawaban responden untuk variabel Pengelolaan Dana Desa (X) menghasilkan 6 item pernyataan dan 30 responden. Berikut detail penjelasannya:

- a. Pernyataan pertama, terdapat 5 responden yang menjawab “sangat setuju”, 13 responden menjawab “setuju” dan 4 responden menjawab “netral”, dan 8 responden menjawab “tidak setuju. Jadi jawaban yang mendominasi adalah setuju, bahwa masyarakat terlibat dalam musyawarah dana desa.
- b. Pernyataan kedua, terdapat 1 responden yang menjawab “sangat setuju”, 7 responden menjawab “setuju”, 8 responden menjawab “netral”, 2 responden menjawab 12 “tidak setuju” 2 responden menjawab “sangat tidak setuju”. Jadi jawaban yang mendominasi adalah tidak setuju bahwa pemerintah desa terbuka tentang informasi dokumen pengelolaan dana desa.
- c. Pernyataan ketiga, terdapat 3 responden yang menjawab “sangat setuju”, 5 responden menjawab “setuju”, 11 responden menjawab “netral”, dan 11

responden menjawab “tidak setuju”. Jadi jawaban yang mendominasi adalah netral dan tidak setuju bahwa pengawasan oleh tim pelaksanaan terhadap pengelolaan dana desa.

- d. Pernyataan keempat, terdapat 4 responden yang menjawab “sangat setuju” 2 responden menjawab “setuju”, 8 responden yang menjawab “netral”, 14 responden yang menjawab “tidak setuju”, 2 responden yang menjawab “sangat tidak setuju”. Jadi jawaban yang mendominasi adalah tidak setuju bahwa masyarakat menerima laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa.
- e. Pernyataan kelima, terdapat 1 responden yang menjawab “sangat setuju” 6 responden yang menjawab “setuju”, 6 responden yang menjawab “netral” 15 responden yang menjawab “tidak setuju” dan 2 responden yang menjawab “tidak setuju”. Jadi jawaban yang mendominasi adalah tidak setuju bahwa masyarakat desa terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dana desa.
- f. Pernyataan keempat, terdapat 2 responden yang menjawab “sangat setuju” 2 responden menjawab “setuju”, 9 responden yang menjawab “netral”, 16 responden yang menjawab “tidak setuju” dan 1 responden yang menjawab “tidak setuju”. Jadi jawaban yang mendominasi adalah tidak setuju bahwa masyarakat menerima laporan keuangan dana desa.

Data instrumen penelitian ini berasal dari pernyataan yang dibuat dalam bentuk kuesioner untuk instrumen yang pertama itu merupakan kelompok pernyataan yang berkaitan dengan Kesejahteraan Masyarakat.

Tabel 4.5 Distribusi Jawaban Responden Kesejahteraan Masyarakat

Variabel	SS		S		N		TS		STS		Total (N)	Total (%)
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%		
Item 1	3	10,0	5	16,7	11	36,7	11	36,7	0	0	30	100
Item 2	4	13,3	2	6,7	8	26,7	14	46,7	2	6,7	30	100

Item 3	4	13,3	12	40,0	4	13,3	7	23,3	3	10,0	30	100
Item 4	10	33,3	11	36,7	3	10,0	6	20,0	0	0	30	100
Item 5	6	20,0	9	30,0	10	33,0	3	10,0	2	6,7	30	100
Item 6	1	3,3	6	20,0	6	20,0	15	50,0	2	6,7	30	100
Item 7	2	6,7	2	6,7	9	30,0	16	53,3	1	3,3	30	100

Sumber Data: Diolah Peneliti Tahun 2025

Berdasarkan tabel 4.5 sebaran jawaban responden untuk variabel Pengelolaan Dana Desa (X) menghasikan 6 item pernyataan dan 30 responden. Berikut detail penjelasannya:

- a. Pernyataan pertama, terdapat 3 responden yang menjawab “sangat setuju”, 5 responden menjawab “setuju” dan 11 responden menjawab “netral”, dan 11 responden menjawab “tidak setuju”. Jadi jawaban yang mendominasi adalah netral dan tidak setuju, bahwa pendapatan saya mengalami peningkatan.
- b. Pernyataan kedua, terdapat 4 responden yang menjawab “sangat setuju”, 2 responden menjawab “setuju” dan 8 responden menjawab “netral”, dan 14 responden menjawab “tidak setuju” dan 2 orang yang menjawab “sangat tidak setuju”. Jadi jawaban yang mendominasi adalah tidak setuju, bahwa pengeluaran rumah tangga saya mengalami peningkatan.
- c. Pernyataan ketiga, terdapat 4 responden yang menjawab “sangat setuju”, 12 responden menjawab “setuju” dan 4 responden menjawab “netral”, dan 3 responden menjawab “tidak setuju” dan 3 responden yang menjawab “sangat tidak setuju”. Jadi jawaban yang mendominasi adalah setuju, bahwa kesehatan anggota keluarga saya semakin baik.
- d. Pernyataan keempat, terdapat 10 responden yang menjawab “sangat setuju”, 11 responden menjawab “setuju” dan 3 responden menjawab “netral”, dan 6 responden menjawab “tidak setuju”. Jadi jawaban yang

mendominasi adalah setuju, bahwa saya mudah mendapatkan pelayanan Kesehatan.

- e. Pernyataan kelima, terdapat 6 responden yang menjawab “sangat setuju”, 9 responden menjawab “setuju” dan 10 responden menjawab “netral”, dan 3 responden menjawab “tidak setuju” dan 2 responden yang menjawab “sangat tidak setuju”. Jadi jawaban yang mendominasi adalah netral, bahwa saya mudah mengakses fasilitas transportasi.
- f. Pernyataan keenam, terdapat 1 responden yang menjawab “sangat setuju”, 6 responden menjawab “setuju” dan 6 responden menjawab “netral”, dan 14 responden menjawab “tidak setuju” dan 2 responden yang menjawab “sangat tidak setuju”. Jadi jawaban yang mendominasi adalah tidak setuju, bahwa saya mudah memasukkan anak ke jenjang pendidikan.
- g. Pernyataan ketujuh, terdapat 2 responden yang menjawab “sangat setuju”, 2 responden menjawab “setuju” dan 9 responden menjawab “netral”, dan 16 responden menjawab “tidak setuju” dan 1 responden yang menjawab “sangat tidak setuju”. Jadi jawaban yang mendominasi adalah tidak setuju, bahwa keadaan tempat tinggal dan fasilitas tinggal saya masih layak huni dan digunakan.

3. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Pengujian statistik dalam penelitian ini anatar lain: *mean* (rata-rata), standar deviasi dan minimum dan maksimum.

Tabel 4.6 Hasil Statistik Deskriptif

N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
---	---------	---------	------	-------------------

Pengelolaan Dana Desa	30	9	28	17,23	4,703
Kesejahteraan Masyarakat	30	14	32	21,50	4,655
Valid N (Listwise)	30				

Sumber Data: Diolah Peneliti Tahun 2025

Dari tabel 4.6 menunjukkan bahwa variabel variabel independent (X) adalah pengelolaan dana desa dan variabel dependen (Y) adalah kesejahteraan masyarakat jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 30 responden.

Berdasarkan hasil uji deskriptif diatas, dapat kita gambarkan distribusi data yang diperoleh oleh peneliti adalah:

- a. Nilai minimal Variabel X (Pengelolaan Dana Desa) yaitu 9, nilai maksimal 28, nilai rata-ratanya 17,23 dan standar deviasianya yaitu 4,703
- b. Nilai minimal Variabel Y (Kesejahteraan Masyarakat) yaitu 14, nilai maksimal 32, nilai rata-ratanya 21,50 dan standar deviasianya yaitu 4,655.

B. Pengujian Persyaratan Analisis Data

1. Uji Validitas

Validitas merupakan metode atau serangkaian prosedur yang digunakan untk mengukur suatu konsep tertentu dan memastikan apakah suatu item pertanyaan dianggap valid. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah butir-butir dalam sebuah pertanyaan (konstruk) layer digunakan untuk mendefinisikan suatu variabel. Instrumen penelitian memiliki kemampuan untuk mengukur dari variabel yang dipelajari, maka penelitian itu valid. Kita dapat membandingkan r hitung dengan r tabel, Dimana:

- a. Ketika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka pernyataan dikatakan valid.
- b. Ketika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka pernyataan dikatakan tidak valid.

Dikatakan valid jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ pada taraf signifikan 5% (0,05).

Pada penelitian ini df (*Degree of Freedom*) yaitu 28 dengan rumus:

$$df = N - 2$$

Keterangan:

N = jumlah dalam penelitian ini (30 sampel) sehingga,

$$df = (30 - 2) = 28$$

Pada taraf signifikan 0,05 diperoleh nilai r_{tabel} 0,3610 jadi, apabila hasil dari r_{hitung} tiap item pernyataan melebihi angka 0,3610 maka item pernyataan dalam penelitian dapat dikatakan valid. Adapun hasil ujinya dalam tabel berikut:

Tabel 4.7 Validitas Variabel Independen (X)

Variabel	No. item Pernyataan	Nilai r_{hitung}	Nilai r_{tabel}	Nilai Signifikan	Keterangan
Pengelolaan Dana Desa	1	0,611	0,3610	0,000	Valid
	2	0,821	0,3610	0,000	Valid
	3	0,746	0,3610	0,000	Valid
	4	0,801	0,3610	0,000	Valid
	5	0,833	0,3610	0,000	Valid
	6	0,793	0,3610	0,000	Valid

Sumber Data: Diolah Peneliti Tahun 2024

Berdasarkan tabel 4.7 hasil uji validitas variabel X, dapat diketahui bahwa nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ dari jumlah 6 item pernyataan yang terdapat dalam kuesioner. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 100% item pernyataan dalam kuesioner tersebut dinyatakan valid.

Tabel 4.8 Validitas Variabel Dependen (Y)

Variabel	No. item Pernyataan	Nilai r_{hitung}	Nilai r_{tabel}	Nilai Signifikan	Keterangan
----------	------------------------	-----------------------	----------------------	---------------------	------------

Kesejahteraan Masyarakat	1	0,653	0,3610	0,000	Valid
	2	0,744	0,3610	0,000	Valid
	3	0,456	0,3610	0,011	Valid
	4	0,484	0,3610	0,007	Valid
	5	0,538	0,3610	0,002	Valid
	6	0,728	0,3610	0,000	Valid
	7	0,728	0,3610	0,000	Valid

Sumber data: Diolah Peneliti Tahun 2025

Berdasarkan pada tabel 4.8 hasil uji validitas variabel Y, dapat diketahui bahwa nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ dari jumlah 7 item pernyataan yang terdapat dalam kuesioner. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 100% item pernyataan valid tersebut dinyatakan valid.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas merupakan alat ukur yang digunakan untuk menentukan sejauh mana data yang diperoleh melalui instrumen penelitian memiliki tingkat keandalan yang dapat dipercaya. Uji ini dilakukan untuk mengetahui konsistensi hasil pengukuran jika dilakukan pengukuran ulang terhadap gejala dan alat ukur yang sama. Reliabilitas menunjukkan tingkat keandalan tertentu. Reliabel berarti dapat dipercaya dan diandalkan.

Untuk menguji reliabilitas diterapkan uji konsistensi internal dengan menggunakan nilai *Cronbach Alpha*, kriteria yang digunakan adalah:

- Jika nilai *Cronbach Alpha* $> 0,6$ maka pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel adalah reliabilitas
- Jika nilai *Cronbach Alpha* $< 0,6$ maka pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel adalah tidak reliabilitas

Tabel 4.9 Uji Reliabilitas Variabel (X)

Variabel	Nilai <i>Cronbach Alpha</i>	Nilai Reabiliats	Keterangan
----------	-----------------------------	------------------	------------

Pengelolaan Dana Desa	0,858	0,60	Reliabel
--------------------------	-------	------	----------

Sumber Data: Diolah Penelitian Tahun 2025

Berdasarkan tabel 4.9 hasil reliabilitas variabel X diperoleh nilai variabel X (Pengelolaan Dana Desa = 0,858 nilai tersebut lebih besar dari 0,60 maka disimpulkan bahwa seluruh instrumen variabel X penelitian ini Reliabel.

Tabel 4.10 Uji Reabilitas Variabel (Y)

Variabel	Nilai <i>Cronbach Alpha</i>	Nilai Reabiliats	Keterangan
Kesejahteraan Masyarakat	0,717	0,60	Reliabel

Sumber Data: Diolah Penelitian Tahun 2025

Berdasarkan tabel 4.10 hasil uji reliabilitas variabel Y diperoleh nilai variabel Y = 0,717, nilai tersebut lebih besar dari 0,60 maka disimpulkan bahwa seluruh instrumen variabel Y penelitian ini Reliabilitas.

3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah tahap yang penting pada analisis regresi linear sederhana. Kegunaan dari uji asumsi klasik adalah untuk melengkapi uji statistik yang sudah dilaksanakan yakni uji t dan uji f. pengujian ini dilakukan untuk memeriksa kualitas data agar diketahui validitas datanya dan untuk menghindari terjadinya estimasi yang bias. Dalam penelitian ini uji asumsi klasik yakni, uji normalitas, dan uji heteroskedastisitas.

Uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, heteroskedastisitas, Tujuannya adalah untuk menghasilkan model regresi yang memenuhi kriteria BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*), yang berarti adanya hubungan sempurna, linear dan pasti antar semua variabel yang dijelaskan dalam model regresi.

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas sebagai salah satu uji statistik parametrik, maka analisis regresi berganda dapat dilakukan jika sampel yang dipakai berdistribusi normal.⁴⁸ Data yang terdistribusi secara normal akan lebih baik digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan fenomena yang terjadi. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan melihat nilai signifikan pada *Kolmogrov-Smirnov* atau *Shapiro-Wilk*, di mana nilai signifikan $> 0,05$ menunjukkan data terdistribusi normal.

Dasar pengambilan keputusan dari uji normalitas yaitu;

- 1) Jika *Kolmogrov-Smirnov* atau *Shapiro-Wilk* > 0.05 , maka data terdistribusi secara normal.
- 2) Jika *Kolmogrov-Smirnov* atau *Shapiro-Wilk* < 0.05 , maka data tidak terdistribusi secara normal.

Tabel 4.11 Uji Normalitas *Shapiro-Wilk*

Variabel	Signifikansi	Taraf Signifikansi (α)	Keputusan
Pengelolaan Dana Desa	0,097	0,05	Normal
Kesejahteraan Masyarakat	0,070	0,05	Normal

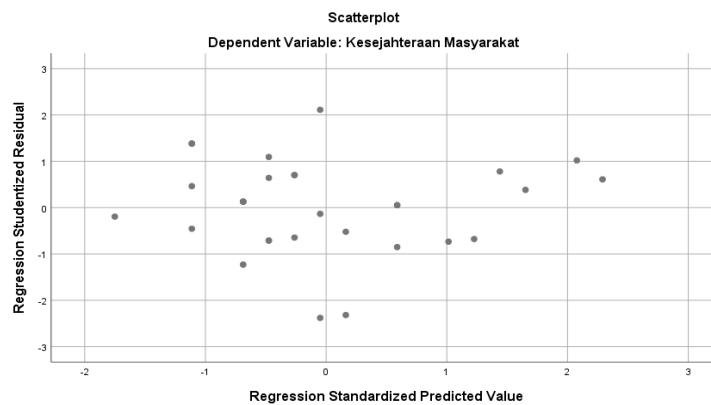
Sumber Data: Diolah Penelitian Tahun 2025

Berdasarkan tabel 4.11 hasil uji normalitas yang dilakukan dengan SPSS dalam hal ini penelitian menggunakan data hasil *Shapiro-Wilk*, dikarenakan jumlah sampel yang digunakan kurang dari 50 sampel. Uji normalitas *Shapiro-Wilk* menunjukkan hasil bahwa: pada variabel X pengelolaan dana desa signifikansi $0,097 > 0,05$, maka data penelitian berdistribusi normal dan variabel Y kesejahteraan masyarakat diperoleh signifikansi $0,070 > 0,05$, maka data penelitian terdistribusi normal.

b. Uji Heterokedastisitas

⁴⁸ Mintarti Indartini, *Analisis Data Kuantitatif*. h. 9

Uji Heterokedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain.⁴⁹ Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka disebut homokedastisitas. jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Deteksi dilakukan dengan melihat adanya pola tertentu dalam grafik yang terjadi antara sumbu Y yang telah diprediksi dan sumbu X yang telah *distudentized*.



Sumber Data: Diolah Penelitian Tahun 2025

Gambar 4.1 Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar 4.1 hasil uji heteroskedastisitas dengan metode scatterplot yang telah dilakukan menunjukkan bahwa titik-titik residual secara acak dan tidak membentuk pola tertentu seperti pola mengerucut, melengkung atau simetris. Pola penyebaran yang acak ini menunjukkan bahwa varians residual bersifat konstan di seluruh rentang nilai prediksi, yang berasumsi homoskedastisitas terpenuhi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.

C. Analisis Regresi Linear Sederhana

⁴⁹ Vikaliana and Dkk, *Ragam Penelitian Dengan Spss*. h.24

Uji Regresi Linear sederhana bertujuan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah positif atau negatif. Nilai variabel terikat jika nilai variabel bebas mengalami kenaikan atau penurunan. Adapun rumusan persamaan regresi linear sederhana secara umum: $y = a + bx$

Tabel 4.12 Uji Regresi Linear Sederhana

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6,654	1,595		4,171	0,000
	Pengelolaan Dana Desa	0,861	0,089	0,877	9,635	0,000
a. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat						

Sumber Data: Diolah Penelitian Tahun 2025

Secara umum persamaan regresi linear sederhana adalah $Y = a + \beta x$. Dimana sebesar 6,654 angka ini merupakan angka *Costant* yang mempunyai arti bahwa tidak ada hubungan Pengelolaan Dana Desa (X) maka nilai Kesejahteraan Masyarakat (Y) adalah 1,595. Sedangkan β merupakan angka koefisien regresi. Dimana nilai β sebesar 0,877 angka ini mempunyai arti bahwa setiap penambahan 1% Pengelolaan Dana Desa (X), maka Kesejahteraan Masyarakat (Y) akan meningkat sebesar 0,877. Karena koefisien regresi bernilai positif (+). Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Dana Desa (X) hubungan terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y). Sehingga persamaan regresinya adalah $Y = 6,654 + 0,877X$.

Dimana:

Y : Kesejahteraan Masyarakat

X : Pengelolaan Dana Desa

Persamaan regresi diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta 6,654, angka tersebut menunjukkan bahwa jika variabel Pengelolaan Dana Desa (X) konstan (tidak mengalami perubahan, maka Kesejahteraan Masyarakat adalah sebesar 6,654.
- b. Pengelolaan Dana Desa (X) menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,861. Maksud hal tersebut adalah jika terjadi kenaikan Pengelolaan Dana Desa sebesar 1% maka Kesejahteraan Masyarakat meningkat sebesar 0,861 dengan dugaan independen dianggap konstan.

C. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan dua tes.yang pertama adalah uji-t yang digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas (independen) secara parsial terhadap variabel terikat (dependen). Dan uji koefisien determinasi (R^2) untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh hubungan antara variabel bebas (independen) dengan variabel terikat (dependen). Model pengujiannya ialah:

1. Uji Statistik Parsial (Uji T)

Metode pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen mampu memengaruhi variabel dependen secara individual. Apabila nilai t hitung $> t$ tabel dan nilai sig. $< 0,05$, maka secara parsial terdapa pengaruh signifikan variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebaliknya, apabila nilai t hitung $< t$ tabel dan nilai sig. $> 0,05$, maka secara parsial tidak terdapat pengaruh signifikan variabel bebas terhadap variabel terikat. Berikut hasil uji parsial (uji T) yang diperoleh dari penelitian ini.

Tabel 4.13 Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6,654	1,595		4,171	0,000
	Pengelolaan Dana Desa	0,861	0,089	0,877	9,635	0,000
a. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat						

Sumber Data: Diolah Penelitian Tahun 2025

Dari hasil uji parsial yang diperoleh dapat dilihat pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa pada variabel Pengelolaan Dana Desa (X) diperoleh nilai t hitung $9,635 >$ nilai t tabel $(2,043)$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ artinya variabel Pengelolaan Dana Desa memiliki pengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat (H_a) diterima.

2. Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Uji Koefisien Determinasi R-square (R^2) menunjukkan seberapa besar pengaruh hubungan antara variabel bebas (independent) dengan variabel terikat (dependen). Koefisien determinasi R^2 pada dasarnya mengukur seberapa baik model dalam menjelaskan variasi terikat (dependen). Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 sampai 1. Jika nilai R^2 mendekati 1 menunjukkan bahwa hasil model regresi baik atau variabel bebas (independent) secara umum dapat menjelaskan variabel terikat (dependen). Sedangkan jika nilai R^2 mendekati 0, berarti variabel independen secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan variabel dependen.

Tabel 4.14 Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.877 ^a	0,768	0,760	2,264
a. Predictors: (Constant), Pengelolaan Dana Desa				

Sumber Data: Diolah Penelitian Tahun 2025

Hasil pengujian koefisien determinasi di atas memperoleh nilai *Adjusted R Square* 0,760. Ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen (Pengelolaan Dana Desa) dalam penelitian ini mempengaruhi variabel dependen (kesejahteraan masyarakat) sebesar 76% sedangkan sisanya 24 dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel yang digunakan penelitian ini.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Pengelolaan Dana Desa Berpengaruh Secara Signifikan Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Katomporong Kabupaten Pinrang

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.⁵⁰ Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam masa 1 tahun anggaran, terhitung sejak tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Peraturan tersebut memiliki 5 tahap dalam melakukan pengelolaan keuangan desa yang baik yang seharusnya memang dijalankan sebagai ketentuan umum.

Kesejahteraan masyarakat terdiri dari dua kata yaitu kesejahteraan dan masyarakat. Kesejahteraan berasal dari kata dasar sejahtera. Sejahtera artinya aman, sentosa, dan makmur, selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesyukuran,

⁵⁰ Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.”pasal .1

dan sebagainya). Kesejahteraan adalah hal dalam keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, dan ketentraman (kesenangan hidup dan sebagainya), kemakmuran.⁵¹

Peneliti menganalisis hasil penelitian tentang pengaruh Pengelolaan Dana Desa dengan indikator pengelolaan dana desa yaitu (Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban) di Desa Katomporang Kecamatan Duampanua sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan keuangan desa adalah proses pemikiran dan penentuan secara matang untuk mencapai suatu tujuan dalam pengelolaan keuangan desa dalam hal kegiatan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat Perencanaan keuangan desa dilaksanakan oleh sekretaris desa dengan menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan RKPDes tahun berkenaan dan menyampaikan kepada Kepala Desa. Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan pembangunan desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 tahun sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 tahun. RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Di Desa Katomporang perencanaan dilakukan setiap 1 kali, jika ada perubahan bisa dilakukan 2 kali dalam satu tahun, dan masyarakat ikut terlibat dalam proses perencanaan di Desa Katomporang.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan keuangan desa adalah proses dimana peraturan desa tentang APBDes yang telah ditetapkan sebelumnya dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa dalam pelayanan, pembangunan maupun dalam

⁵¹ Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*. h. 1284

pemberdayaan. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. semua pemasukan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Dalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Pelaksanaan keuangan desa di Desa Katomporong melibatkan masyarakat sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa masyarakat terlibat dan terdapat pengawas terhadap proses pelaksanaan di Desa Katomporong.

3. Penatausahaan

Penatausahaan adalah proses dimana semua kegiatan/pelaksanaan keuangan desa dikelola dan dicatat dalam buku-buku tertentu oleh bendahara desa yang sebelumnya telah ditetapkan oleh kepala desa dengan keputusan kepala desa. Setiap pencatatan dan pengeluaran, tutup buku setiap akhir bulan secara tertib serta wajib bendahara mempertanggungjawabkan merupakan tugas yang harus dilakukan oleh bendahara. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Bendahara Desa melakukan pencatatan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum untuk yang bersifat Tunai. Sedangkan transaksi penerimaan dan pengeluaran yang melalui bank/transfer dicatat dalam Buku Bank. Proses penatausahaan atau proses pencatatan semua kegiatan sudah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku sesuai dengan aturan yang berlaku di desa Katomporong.

4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDes/ laporan realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Sedangkan laporan semester akhir disampaikan paling lambat pada akhir

bulan Januari tahun berikutnya.⁵² Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan. Akuntabilitas merupakan bentuk tanggungjawab pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Pelaporan dan pertanggungjawaban di desa Katomporang melibatkan masyarakat dimana masyarakat menerima laporan pertanggungjawaban/laporan keuangan desa.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian menyatakan bahwa pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Katomporang Kabupaten Pinrang mengenai apakah Pengelolaan Dana Desa Berpengaruh Secara Signifikan Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Katomporang Kabupaten Pinrang. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa Dana Desa berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

Teori *stewardship* dan teori akuntansi sektor publik keduanya menekankan pentingnya tanggung jawab dan tata kelola yang baik dalam pengelolaan keuangan publik. Teori *stewardship* memandang aparat desa sebagai pelayanan masyarakat yang memiliki komitmen untuk bertindak demi kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Dalam konteks ini, kepada desa dan perangkatnya bertanggung jawab untuk mengelolaa dana desa secara jujur, transparan, dan akuntabel agar program-programnya Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat benar-benar tepat sasaran sementara itu, teori akuntansi sektor publik menekankan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan partisipasi masyarakat dalam seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan hingga

⁵² Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.”

pelaporan. Kedua teori ini saling melengkapi dalam menjelaskan juga merupakan bentuk pengabdian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui tata kelola keuangan yang berorientasi pada pelayanan publik.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Syarifa Amira yang menyatakan bahwa Syarifa Amira bahwa proses pengelolaan dana desa di Desa Cillellang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dilakukan sesuai undang-undang hal ini meningkatkan pembangunan ekonomi di masyarakat Desa Cillellang dan secara merata telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Cillellang.⁵³

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Nismawati yang menyatakan bahwa hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa dalam pengelolaan dana desa di tengah pandemi Covid-19 memiliki perbedaan dengan pengelolaan dana desa yang ada pada tahun sebelumnya, pengelolaan dana desa ditengah pandemi ini ada perencanaan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya karena anggaran dana yang telah disiapkan untuk infrastruktur harus di alihkan untuk bantuan kepada masyarakat.⁵⁴ Hasil ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat bila terjadi bencana.

⁵³ Amira, "Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Masyarakat Desa Cillellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru."

⁵⁴ Nismawati, "Pengelolaan Dana Desa Ditengah Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Desa Bulu Allaporenge Kecamatan Bengo Kabupaten Bone)."

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait pengaruh Pengelolaan Dana Desa terhadap Peningkatan Kesejahteraan Desa Katomporang Kabupaten Pinrang, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Pengelolaan Dana Desa berpengaruh secara signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Katomporang Kabupaten Pinrang. Ini dibuktikan dari hasil uji t yang dilakukan, dimana diperoleh t hitung sebesar $9,635 > \text{nilai } t \text{ tabel } 2,048$ serta memiliki nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Sehingga hipotesis diterima. Secara substantif, pengelolaan dana desa yang dilaksanakan melalui perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan yang baik, mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

B. Saran

Berdasarkan hasil interpretasi atau simpulan yang telah dilakukan peneliti memiliki saran sebagai berikut:

1. Bagi IAIN Parepare, diharapkan skripsi ini dapat menjadi tambahan wawasan bagi pembaca, terutama mahasiswa IAIN Parepare.
2. Bagi Pemerintah Desa, disarankan agar masyarakat yang menerima bantuan langsung tunai untuk dilibatkan atau diwajibkan aktif disetiap kegiatan sosial seperti pada gotong royong dalam membersihkan lingkungan desa.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya, disarankan untuk menambah variabel lain seperti partisipasi masyarakat, transparansi keuangan agar pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat dapat dianalisis lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al Karim

Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta, 2021.

Alman. "Kejari Pinrang Mengadakan Pelatihan Aplikasi Jaga Desa Guna Mewujudkan Pengelolaan Dana Desa Yang Transparan, Akuntabel Dan Efektif." 26 Februari, 2025.

Amira, Syarifa. "Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Masyarakat Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru." Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022.

Amruddin, Dkk. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Edited by Fatma Sukmawati. Sukoharjo: Pradina Pustaka, 2022.

Aribowo, Didik, Arum Wahyuni, Sultan Ageng Tirtayasa, Sultan Ageng Tirtayasa, Universitas Sultan, and Ageng Tirtayasa. *BUMDes Dan Kesejahteraan Masyarakat Desa*. Dr. Cucu N. Jakarta Pusat: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2018.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). "Buku Saku Pendataan BLT Dana Desa," 2020.

Badan Pusat Statistik Indonesia. "Pengeluaran Untuk Konsumsi Penduduk Indonesia," 2023.

Creswell, Jhon W. *Design Research Kuantitatif Kualitatif*. Annaba. Edisi Ket. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Darwis. *Fundamental Manajemen: Fungsi-Fungsi Dalam Implementasi*. Edited by Damirah. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022.

Donaldson, Lex, and James H. Davis. "Stewardship Theory or Agency Theory:" *Australian Journal of Management* 16, no. June 1991 (1991): 49–66.

Fauziah, Fenty, and Rinda Sandaya Karhab. "Pelatihan Pengolahan Data Menggunakan Aplikasi SPSS Pada Mahasiswa" 1, no. 2 (2019): 129–36.

Fikasari, Susi. "Pengelolaan Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Tuncung Kabupaten Enrekang." IAIN Pare pare, 2024.

Frihatni, Andi ayu, DKK. "Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam

- Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Parepare.” *Economos: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 4 (2021): 229–39.
- Garda Fajar Panuluh. “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.” Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2020.
- Hulu, Yamulia, R Hamdani, Harahap Muhammad, and Arif Nasution. “Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa” 10, no. 1 (2018): 146–54.
- Indonesia, Badan Statistik. *Statistik Indonesia 2000*. Jakarta, 2000.
- Indonesia, Republik. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa,” n.d.
- Indonesia, Reublik. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa (n.d.).
- Indra, Bastian. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedu. Jakarta: Selembah Empat, 2006.
- Indrayani. *Modul Akuntansi Sektor Publik*. IAIN Parepare, 2022.
- Lisnawati. “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada Dusun Padakkalawa Kab. Pinrang.” Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024.
- Mentari Tumbel, Satria. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di DesaTumaluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan.” *Jurnal Politico* 6, no. 1 (2017): 1–21.
- Mintarti Indartini, Mutmainah. *Analisis Data Kuantitatif*. Edited by Hartirini Warnaningtyas. Jawa Tengah: Lakeisha, 2024.
- Nasional, Depertemen Pendidikan. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Nismawati. “Pengelolaan Dana Desa Ditengah Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Desa Bulu Allaporenge Kecamatan Bengo Kabupaten Bone).” Universitas Hsanunddin, 2021.
- Novelia Kiki Permatasari, Enjat Sudrajat, Asih Sunarsih. “Pengaruh Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Yang Dimediasi Oleh Indeks

- Pembangunan Manusia Dan Dimoderasi Oleh Akuntabilitas.” *Tirtayasa Ekonoika* 19, no. 2 (2024): 275–88.
- Nugroho, Rian. *Kebijakan Publik Formulasi Kebijakan Publik*. Indonesia: Elex Media Komputindo, 2003.
- Nur, Sri Wahyuni. “Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tellumpanuae Kabupaten Maros.” *Um Jember Press*, n.d., 725–39.
- Panuluh, Fajar. *Buku Pintar Dana Desa. Proposal SIMLITAMAS*, 2020. https://drive.google.com/open?id=1_noSAVSk9r0fSwkPSxzMLUcN-0NQ0hbL.
- Pembangunan, Badan Pengawasan Keuangan dan. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, 2015.
- Pramita, Ellsa Diah. “Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Islam.” Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung, 2021.
- RI, Kementerian Agama. *Al-Quran Dan Terjemahannya*, n.d.
- Rinaldi. “Pengaruh Pemberdayaan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Islam.” UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2020.
- Sahara, Ira. “Analisis Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Pelaksanaan Program Kerja Di Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare.” *Economos: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 3 (2020): 118–28.
- Sahir, Syarida Hanafi. *Metodologi Penelitian*. Try koryat. Medan: Kbm Indonesia, 2022.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA,CV, 2013.
- Sugiyono. *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta, 2023.
- Sukmasari, Dahliana. “Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur’an.” *Jornal OF Qur’an and Hadis Studies* 3, no. 1 (2020): 1–16.
- Tim Penyusun. *Pedoman penulisan karya tulis ilmiah*. Parepare, 2023
- Vikaliana, Resista, and Dkk. *Ragam Penelitian Dengan Spss*. Edited by Miftahus Sahu. Jawa Tengah: CV Tahta Media Group, 2022.

Wahyuni, Sri, and Darmawan Sriyanto. *Pengelolaan Dana Desa Demi Kesejahteraan Masyarakat Penulis*: Edited by Bincar Nasution. PT Inovasi Pratama Internasional, 2023.

Yuesti, Anik. *Akuntansi Dana Desa*. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2023.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

	<p align="center"> KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No.8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307 </p>
<p align="center">INSTRUMEN PENELITIAN (ANGKET)</p>	

NAMA MAHASISWA : HIKMAH PURNAMA
 NIM : 2120203862202013
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 PROGRAM STUDI : AKUNTANSI SYARIAH
 JUDUL : PENGARUH PENGELOLAAN DANA DESA
 TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
 MASYARAKAT DESA KATOMPORANG
 KABUPATEN PINRANG

KUESIONER PENELITIAN

Assalamualaikum Wr.Wb.

Dengan Hormat,

Berkenan dengan pelaksanaan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “PENGARUH PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA KATOMPORANG KABUPATEN PINRANG” maka saya memohon kesediaan saudara/i untuk mengisi kuesioner penelitian ini dengan penilaian secara objektif. Data dari saudara/i akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan akademis penelitian semata. Atas kesediaan dan partisipasinya dalam mengisi kuesioner ini, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Hormat Saya,

Hikmah Purnama

I. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama :
2. Umur :
3. Jenis Kelamin :
4. Pekerjaan :

II. PETUNJUK PENGISIAN

- i. Pertanyaan yang ada, mohon dibaca dan dipahami dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak ada pernyataan yang tidak terisi atau terlewat.
- ii. Berilah tanda ceklis pada jawaban yang saudara/i pada kolom yang telah disediakan. Pilihan jawaban yang sesuai pendapat atas pertanyaan, dengan keterangan dibawah ini

SS : Sangat Setuju	=5
S : Setuju	=4
N : Netral	=3
TS: Tidak Setuju	=2
STS: Sangat Tidak Setuju	=1
- iii. Setiap pertanyaan hanya membutuhkan satu jawaban saja
- iv. Terimakasih atas partisipasinya

III. Daftar pertanyaan-pertanyaan beserta alternatif jawaban

No	Pernyataan	Jawaban				
		SS (5)	S (4)	N (3)	TS (2)	STS (1)
Dana Desa						
1	Masyarakat terlibat dalam musyawarah dana desa					
2	Pemerintah desa terbuka tentang informasi dokumen pengelolaan dana desa					

3	Pengawasan oleh tim pelaksana terhadap pengelolaan dana desa					
4	Masyarakat menerima laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa					
5	Masyarakat desa terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dana desa					
6	Masyarakat menerima laporan keuangan dana desa					
Kesejahteraan Masyarakat						
1	Pendapatan saya mengalami peningkatan					
2	Pengeluaran rumah tangga saya mengalami peningkatan					
4	Kesehatan anggota keluarga saya semakin baik					
5	Saya mudah mendapatkan pelayanan kesehatan					
6	Saya mudah mengakses fasilitas transportasi					
7	Saya mudah memasukkan anak ke jenjang pendidikan					
8	Keadaan tempat tinggal dan fasilitas tinggal saya masih layak huni dan digunakan					

DESKRIPSI JAWABAN RESPONDEN

Rekapitulasi Jawaban Responden Variabel Pengelolaan Dana Desa (X1)

No	Pengelolaan Dana Desa						Total X
1	3	3	3	2	2	2	15
2	4	2	2	2	2	2	14
3	4	2	2	2	2	2	14
4	5	3	3	3	3	3	20
5	4	3	3	2	2	2	16
6	4	3	3	2	2	2	16
7	4	2	2	2	2	2	14
8	3	2	5	2	2	2	16
9	2	2	2	2	2	2	12
10	4	4	4	4	4	4	24
11	4	1	3	2	2	3	15
12	5	4	4	4	4	4	25
13	4	2	2	3	4	2	17
14	2	2	2	2	2	2	12
15	2	2	2	2	2	2	12
16	4	4	3	5	2	2	20
17	5	5	5	2	4	2	23
18	5	4	5	5	4	5	28
19	4	4	4	3	4	3	22
20	4	4	3	5	2	2	20
21	5	1	4	1	1	2	14
22	3	3	3	3	3	3	18
23	2	2	2	2	2	2	12
24	2	3	3	3	3	3	17
25	2	2	2	1	1	1	9
26	4	2	2	2	2	3	15
27	3	3	3	3	3	3	18
28	4	4	4	5	5	5	27
29	2	2	2	3	3	3	15
30	2	3	3	3	3	3	17

Rekapitulasi Jawaban Responden Variabel Kesejahteraan Masyarakat (Y)

No	Kesejahteraan Masyarakat							Total Y
1	3	2	4	5	3	2	2	21
2	2	2	5	4	2	2	2	19
3	2	2	1	5	5	2	2	19
4	3	3	2	5	3	3	3	22
5	3	2	4	4	2	2	2	19
6	3	2	5	5	3	2	2	22
7	2	2	4	3	4	2	2	19
8	5	2	2	5	4	2	2	22
9	2	2	3	4	5	2	2	20
10	4	4	4	5	4	4	4	29
11	3	2	5	2	5	2	3	22
12	4	4	4	5	4	4	4	29
13	2	3	3	4	3	4	2	21
14	2	2	4	4	4	2	2	20
15	2	2	2	5	3	2	2	18
16	3	5	4	4	4	2	2	24
17	5	2	4	5	3	4	2	25
18	5	5	4	4	5	4	5	32
19	4	3	2	4	4	4	3	24
20	3	5	4	4	4	2	2	24
21	4	1	1	4	3	1	2	16
22	3	3	2	2	1	3	3	17
23	2	2	4	2	2	2	2	16
24	3	3	5	5	4	3	3	26
25	2	1	3	3	3	1	1	14
26	2	2	2	2	5	2	3	18
27	3	3	3	3	3	3	3	21
28	4	5	4	4	5	5	5	32
29	2	3	2	2	3	3	3	18
30	3	3	1	2	1	3	3	16

HASIL SPSS

Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	LAKI-LAKI	11	36.7	36.7	36.7
	PEREMPUAN	19	63.3	63.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	15 - 30	3	10.0	10.0	10.0
	35 - 45	6	20.0	20.0	30.0
	45 - 55	7	23.3	23.3	53.3
	>55	14	46.7	46.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	PETANI	8	26.7	26.7	26.7
	IRT	19	63.3	63.3	90.0
	TIDAK BEKERJA	3	10.0	10.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Tabel 4.4 Hasil Statistik Deskriptif**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PENGELOLAAN DANA DESA	30	9	28	17.23	4.703
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	30	14	32	21.50	4.622
Valid N (listwise)	30				

**Tabel 4.5 Distribusi Jawaban Responden Untuk Variabel Pengelolaan Dana Desa
Uji Validitas Variabel Independen (X)****Correlations**

		X1	X2	X3	X4	X5	X6	TOTALX
X1	Pearson Correlation	1	.367*	.522**	.281	.305	.310	.611**
	Sig. (2-tailed)		.046	.003	.133	.101	.096	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X2	Pearson Correlation	.367*	1	.593**	.694**	.666**	.448*	.821**
	Sig. (2-tailed)	.046		.001	.000	.000	.013	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X3	Pearson Correlation	.522**	.593**	1	.369*	.492**	.489**	.746**
	Sig. (2-tailed)	.003	.001		.045	.006	.006	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30

X4	Pearson Correlation	.281	.694**	.369*	1	.636**	.673**	.801**
	Sig. (2-tailed)	.133	.000	.045		.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X5	Pearson Correlation	.305	.666**	.492**	.636**	1	.762**	.833**
	Sig. (2-tailed)	.101	.000	.006	.000		.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X6	Pearson Correlation	.310	.448*	.489**	.673**	.762**	1	.793**
	Sig. (2-tailed)	.096	.013	.006	.000	.000		.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
TOTALX	Pearson Correlation	.611**	.821**	.746**	.801**	.833**	.793**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	30	30	30	30	30	30	30

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tabel 4.6 Uji Reliabilitas Variabel (X)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

.858	6
------	---

Tabel 4.7 Validitas Variabel Dependen (Y)**Correlations**

		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	TOTALY
Y1	Pearson Correlation	1	.369*	.056	.377*	.154	.492**	.489**	.653**
	Sig. (2-tailed)		.045	.768	.040	.415	.006	.006	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
Y2	Pearson Correlation	.369*	1	.214	.099	.258	.636**	.673**	.744**
	Sig. (2-tailed)	.045		.256	.602	.168	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
Y3	Pearson Correlation	.056	.214	1	.177	.163	.098	.083	.456*
	Sig. (2-tailed)	.768	.256		.350	.388	.605	.664	.011
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
Y4	Pearson Correlation	.377*	.099	.177	1	.254	.160	-.033	.484**
	Sig. (2-tailed)	.040	.602	.350		.176	.399	.862	.007
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
Y5	Pearson Correlation	.154	.258	.163	.254	1	.125	.312	.538**
	Sig. (2-tailed)	.415	.168	.388	.176		.509	.093	.002
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
Y6	Pearson Correlation	.492**	.636**	.098	.160	.125	1	.762**	.728**
	Sig. (2-tailed)	.006	.000	.605	.399	.509		.000	.000

	N	30	30	30	30	30	30	30	30
Y7	Pearson Correlation	.489**	.673**	.083	-.033	.312	.762**	1	.728**
	Sig. (2-tailed)	.006	.000	.664	.862	.093	.000		.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
TOTALY	Pearson Correlation	.653**	.744**	.456*	.484**	.538**	.728**	.728**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.011	.007	.002	.000	.000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tabel 4.8 Uji Reliabilitas Variabel (Y)

Reliability Statistics

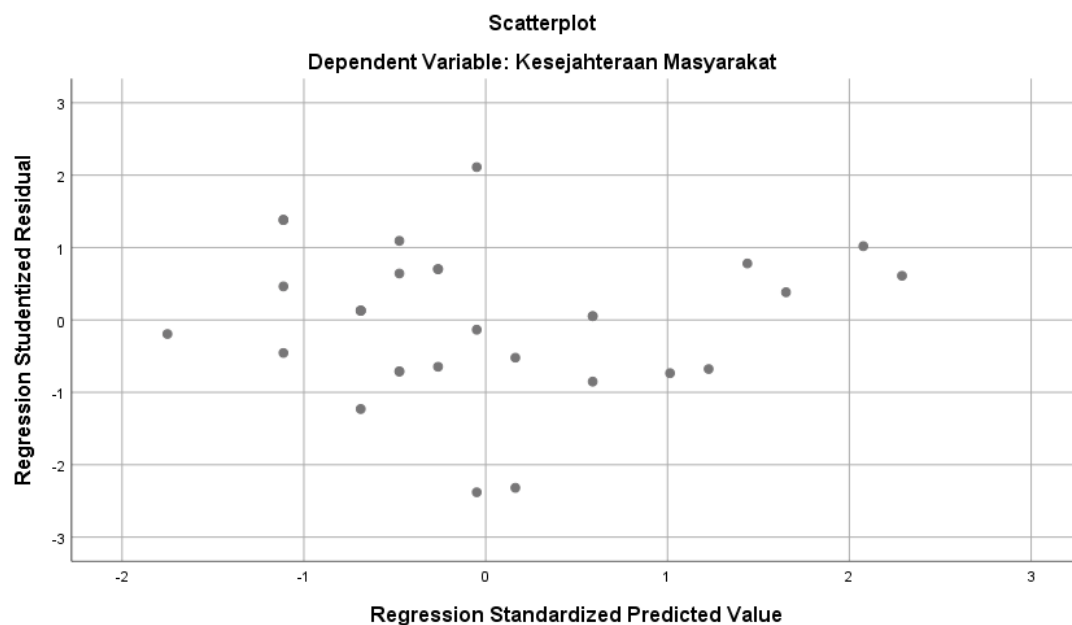
Cronbach's Alpha	N of Items
.717	7

Tabel 4.9 Uji Normalitas *Shapiro-Wilk*

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Pengelolaan Dana Desa	.153	30	.071	.941	30	.097
Kesejahteraan Masyarakat	.157	30	.057	.936	30	.070

a. Lilliefors Significance Correction

Gambar 4.1 Uji Heteroskedastisitas**Tabel 4.10 Uji Regresi Linear Sederhana****Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1(Constant)	6.654	1.595		4.171	.000
Pengelolaan Dana Desa	.861	.089	.877	9.635	.000

a. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat

Tabel 4.11 Uji Parsial (Uji T)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1(Constant)	6.654	1.595		4.171	.000
Pengelolaan Dana Desa	.861	.089	.877	9.635	.000

Tabel 4.11 Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)**Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.877 ^a	.768	.760	2.264

a. Predictors: (Constant), Pengelolaan Dana Desa

b. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

**BERITA ACARA
 REVISI JUDUL SKRIPSI**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama : HIKMAH PURNAMA
 N I M : 2120203862202013
 Prodi : Akuntansi Syariah

Menerangkan bahwa judul skripsi semula:

PENGARUH PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TERHADAP
 PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA KATOMPORANG
 KECAMATAN DUAMPANUA

Telah diganti dengan judul baru:

PENGARUH PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP PENINGKATAN
 KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA KATOMPORANG KABUPATEN
 PINRANG

dengan alasan / dasar:

Perubahan Kecamatan Duampunua ke Kabupaten Pinrang agar lebih
 representatif secara administratif dan memudahkan dalam penelitian

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 17 Juli 2025

Pembimbing Utama

Ira Sahara, M.Ak.



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
 NIP. 197102082001122002



DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
NOMOR : B-4136/In.39/FEBI.04/PP.00.9/08/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR MAHASISWA


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAEREPARE

- Menimbang a. Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi/tugas akhir mahasiswa FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa tahun 2024
- b. Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk disertai tugas sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Memperhatikan : a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2...307381/2024, tanggal 24 November 2023 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2024
- b. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor: 361 Tahun 2024 Tahun 2024, tanggal 21 Pebruari 2024 tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan : a. Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2024
- b. Menunjuk saudara: **Ira Sahara, M.Ak**, sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir bagi mahasiswa :
- Nama Mahasiswa : HIKMAH PURNAMA
- NIM : 2120203862202013
- Program Studi : Akuntansi Syari'ah
- Judul Penelitian : PENGARUH PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA KATOMPORANG KECAMATAN DUAMPANUA
- c. Tugas pembimbing adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi/tugas akhir;
- d. Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
- e. Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Parepare
Pada tanggal 12 Agustus 2024
Dekan.



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
Nomor : 503/0241/PENELITIAN/DPMPPTSP/05/2025

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 16-05-2025 atas nama HIKMAH PURNAMA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
10. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0375/R/T.Teknis/DPMPPTSP/05/2025, Tanggal : 16-05-2025
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0253/BAP/PENELITIAN/DPMPPTSP/05/2025, Tanggal : 16-05-2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :


1. Nama Lembaga	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga	: JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG PAREPARE
3. Nama Peneliti	: HIKMAH PURNAMA
4. Judul Penelitian	: PENGARUH PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA KATOMPORANG KABUPATEN PINRANG
5. Jangka waktu Penelitian	: 1 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian	: MASYARAKAT YANG MENERIMA BLT
7. Lokasi Penelitian	: Kecamatan Duampanua

KEDUA : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 16-11-2025.


KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 19 Mei 2025




Blaya : Rp 0,-




Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP.,M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang







Balai Sertifikasi Elektronik




CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM



ZONA HIJAU



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA



DPMPPTSP



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN DUAMPANUA
DESA KATOMPORANG**

No.Kode :73.15.06.11

Jalan :Porospinrangpolman km.17 kodepos 91253

SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI
NOMOR :188/ *46* /DK/DP/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Katomporang Kec.Duampanua Kabupaten Pinrang menerangkan bahwa :

Nama Lengkap : **Rustang Sirrang**
Jabatan : Kepala Desa Katomporang

Dengan ini menerangkan bahwa sesungguhnya bahwa :

Nama : HIKMAH PURNAMA
NIM : 2120203862202013
Tempat/Tgl Lahir : Lasape, 16-04-2003
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Akuntansi Syari'ah
Alamat : Lasape Desa Katomporang

Bahwa Nama tersebut diatas benar telah melakukan penelitian Pada Tanggal 14 Mei Sampai 14 Juni 2025 di Desa Katomporang Kec. Duampanua Kab. Pinrang dengan judul skripsi : "**PENGARUH PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA KATOMPORANG KABUPATEN PINRANG**".

Demikian surat keterangan ini diberikan Kepadaanya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

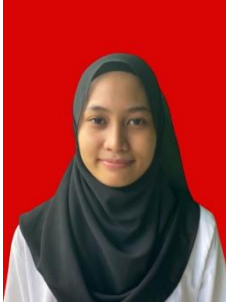


Katomporang, 14 Juni 2025
Kepala Desa Katomporang

DOKUMENTASI PENELITIAN



BIODATA PENULIS



Hikmah Purnama, lahir di Lasape pada tanggal 16 April 2003. Merupakan anak ketiga dari Bapak Abduh Muh. Islam dan Ibu Hartati. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Riwayat pendidikan berasal dari Taman Kanak-kanak TK Nurul Falah Lasape pada tahun 2008-2009, Sekolah Dasar Negeri 261 Pinrang pada Tahun 2009-2015. Kemudian dilanjutkan Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pinrang pada tahun 2015-2018 dan dilanjutkan Sekolah Menengah Atas negeri 2 Pinrang pada tahun 2018-2021. Pada tahun 2021 penulis melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis pernah melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Kelurahan Batupanga Kabupaten Polewali dan melaksanakan Praktik Pengalaman (PPL) di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pinrang.